



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI NTB



LAPORAN KINERJA

BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2024



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Penyajian target dan capaian kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan menjalankan 7 (tujuh) fungsi BPMP. Ketujuh fungsi tersebut merupakan penjabaran tujuan kegiatan yang tertuang secara detail dalam program/kegiatan guna merealisasikan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Masing-masing program/kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel. Secara umum BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sebagai akhir periode renstra, laporan ini juga menggambarkan ringkasan capaian kinerja periode renstra 2020-2024.

Tantangan dan permasalahan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Hadirnya laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2024 dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan, pelaksanaan program, dan perumusan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di masa mendatang, serta menjadi pertanggungjawaban dan pemacu peningkatan kinerja bagi seluruh elemen organisasi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Mataram, 24 Januari 2025
Kepala



Katman, S.Pd., M.A.
NIP 196804082001121001

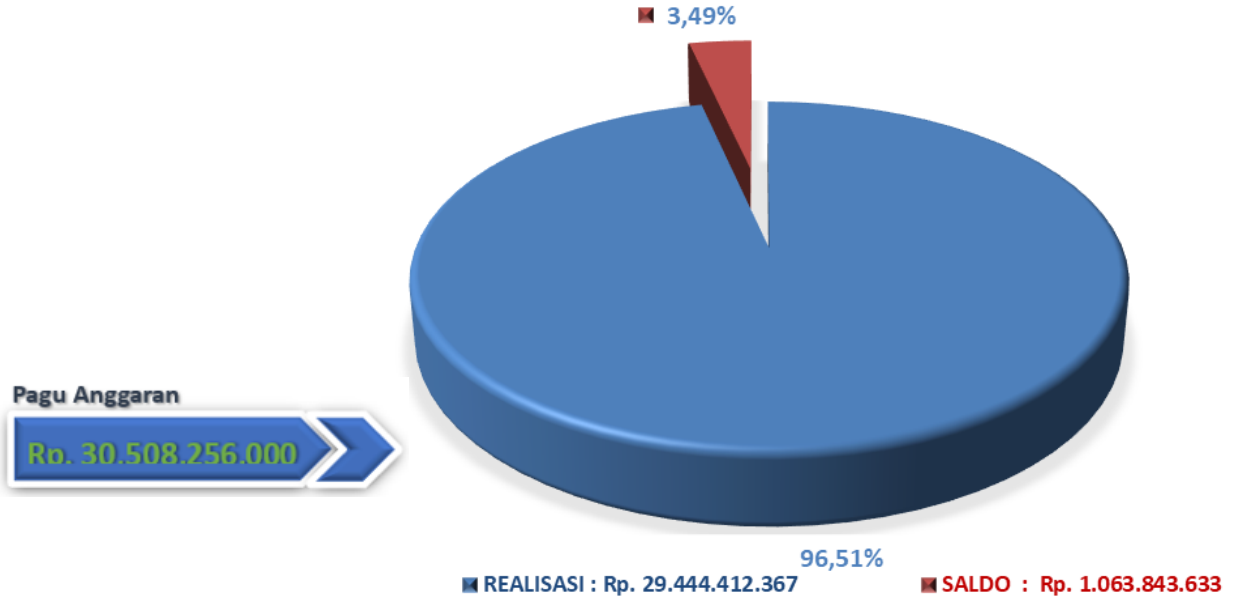


Daftar Isi

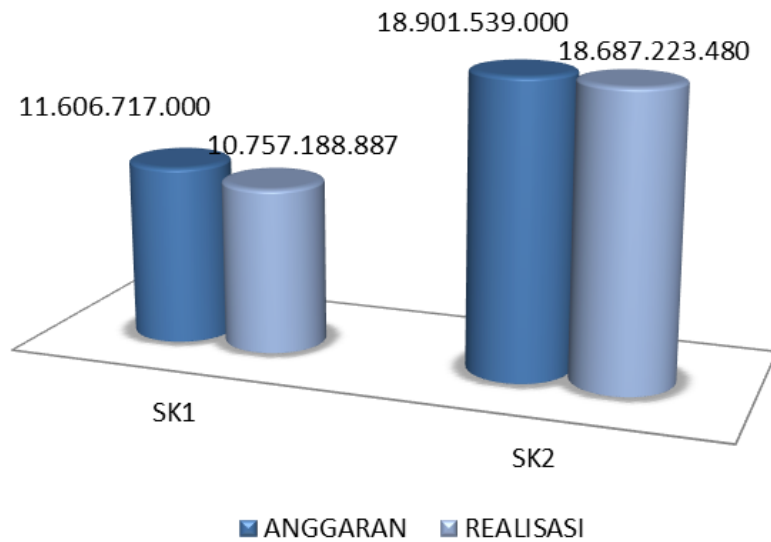
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I	Pendahuluan	
	A. Gambaran Umum	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	4
	D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	4
BAB II	Perencanaan Kinerja	
	A. Rencana Strategis	7
	Tujuan Strategis	7
	Matrik Kinerja	7
	B. Program Prioritas	9
	C. Rencana Kerja dan Anggaran	13
	D. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
	A. Akuntabilitas Kinerja	17
	B. Realisasi Program/Agenda Prioritas	41
	C. Realisasi Anggaran	42
	D. Kinerja Lain-lain	44
BAB IV	Penutup	59
	Lampiran Lampiran	
	Dokumen Perjanjian Kinerja (awal dan revisi terakhir)	
	Dokumen Pengukuran Kinerja	
	Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu	
	SK Tim Penyusun LAKIN 2024	
	SK Tim Reviu LAKIN 2024	

Ikhtisar Eksekutif

REALISASI CAPAIAN ANGGARAN



PENYERAPAN ANGGARAN 2024



SASARAN KEGIATAN #1

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

	Target	Realisasi	Capaian
IKK 1.1. Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	3,92	11,93	304,32%
IKK 1.2. Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	72,70	100	137,55%

SASARAN KEGIATAN #2

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

	Target	Realisasi	Capaian
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	A	A	100%
IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	97,77	98,33	101,08%



PERMASALAHAN UMUM

- 1 KURANG OPTIMALNYA TIM PMO DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DISEBABKAN PENGANGGARAN YANG BELUM FOKUS PADA DUKUNGAN PELAKSANAAN PSP, KURANGNYA INISIATIF DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PMO, RENDAHNYA TINGKAT KEPEDULIAN DARI UNSUR PEJABAT DAN SERING TERJADINYA PENGANTIAN PEJABAT.
- 2 MASIH RENDAHNYA AKTIVITAS BELAJAR MANDIRI MELALUI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR (PMM) DISEBABKAN BEBERAPA GURU DAN KEPALA SEKOLAH LUPA AKUN BELAJAR.ID, DAN KEMAMPUAN IT YANG MASIH RENDAH
- 3 BANYAK SATUAN PENDIDIKAN YANG BELUM MENGGUNAKAN SIPLAH UNTUK PENGADAAN BARANG ATAU JASA.
- 4 TIDAK SEMUA KEPALA SEKOLAH DAN GURU MEMAHAMI FUNGSI DAN MANFAAT PLATFORM PEMBELAJARAN (GWE) TERMASUK UNTUK PESERTA DIDIK.
- 5 KURANG OPTIMALNYA PEMANFAATAN CHROMEBOOK UNTUK PEMBELAJARAN DISATUAN PENDIDIKAN
- 6 MASIH ADA SATUAN PENDIDIKAN YANG BELUM MELAKUKAN ANALISIS RAPOR PENDIDIKAN, MEMAHAMI MEKANISME PERENCANAAN BERBASIS DATA (PBD) DAN MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).
- 7 TIDAK ADA REGULASI TERKAIT PERSENTASE MINIMAL SUB KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), DAN MASIH ADANYA PERBEDAAN PEMAHAMAN DI PEMDA TERKAIT REGULASI SPM
- 8 TERDAPAT PERBEDAAN PERSEPSI PEMDA TERKAIT PENGANGKATAN GURU PENGGERAK PENJADI KEPALA SEKOLAH/PENGAWAS SEKOLAH (KSPS).
- 9 PEMDA PROVINSI BELUM MEMILIKI SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (PPKSP).
- 10 PEMAHAMAN TERKAIT KEBIJAKAN ASESMEN NASIONAL BELUM DIPAHAMI OLEH SELURUH SATUAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.
- 11 TERDAPAT PESERTA DIDIK AKTIF YANG TERDATA SEBAGAI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS).
- 12 BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSISI PAUD SD YANG MENYENANGKAN DI SATUAN PENDIDIKAN.
- 13 PROGRAM PEMULIHAN PEMBELAJARAN MELALUI PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI BELUM DITERAPKAN DI SEMUA SATUAN PENDIDIKAN.
- 14 PROGRAM GERAKAN SEKOLAH SEHAT (GSS) BELUM MENJANGKAU SEMUA SATUAN PENDIDIKAN.
- 15 PELAYANAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) DI KABUPATEN/KOTA BELUM MAKSIMAL.
- 16 TATA KELOLA DAPODIK DI BEBERAPA SATUAN PENDIDIKAN TERKAIT KELENGKAPAN, VALIDITAS DAN KEMUTAKHIRAN DATA BELUM OPTIMAL.



LANGKAH ANTISIPASI

- 1** **SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.**

- 2** **MELAKUKAN ADVOKASI DALAM MEMPERKUAT KERJASAMA BERSAMA PEMANGKU KEPENTINGAN.**

- 3** **MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.**

- 4** **BERKOORDINASI SECARA INTENSIF DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.**

- 5** **KOLABORASI DENGAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENCAPAI TARGET KINERJA.**

- 6** **MELAKUKAN REFLEKSI SECARA RUTIN UNTUK PERBAIKAN BERKELANJUTAN.**

- 7** **MENJADIKAN INOVASI SEBAGAI STRATEGI DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.**

- 8** **DISEMINASI DAN BERBAGI PRAKTIK BAIK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.**

Bab I Pendahuluan

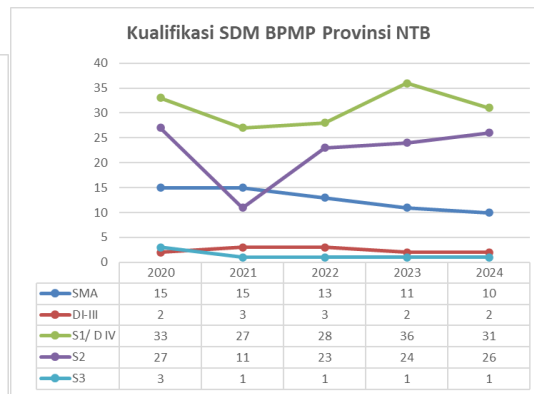
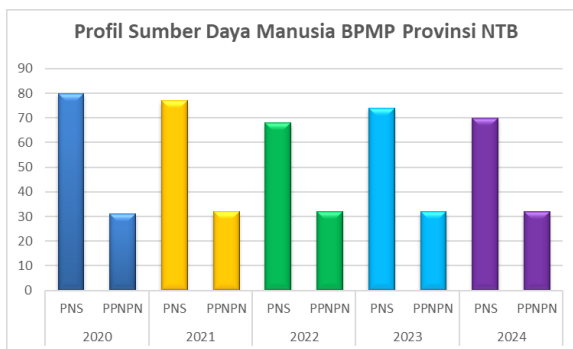
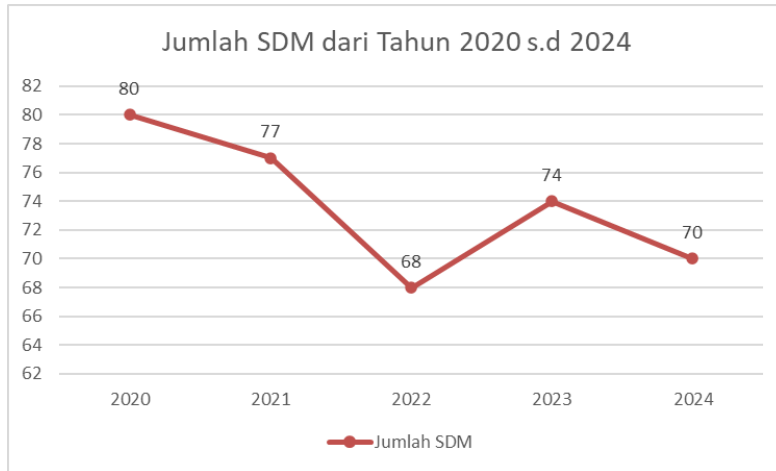
A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat) merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah sesuai dengan peraturan Permendikbudristek No 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat pertama kali dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Wilayah kerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melingkupi 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut transformasi kelembagaan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat:



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Katman, S.Pd., M.A. dengan jumlah SDM sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Berikut jumlah SDM dari tahun 2020 s.d. 2024 :



Data per 31 Desember 2024

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, disusun untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang hal-hal berikut:

- Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek.
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Memberikan rekomendasi secara komprehensif dan produktif untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam menopang Renstra Kemendikbudristek untuk peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- 5 PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8 Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- 10 Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

- 11 Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

- 13 Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen.

C. Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

TUGAS

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

FUNGSI

- 1 Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.
- 2 Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.
- 3 Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- 4 Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- 5 Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.
- 7 Pelaksanaan urusan administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU STRATEGIS

- 1 Kurang optimalnya Tim PMO daerah di Kabupaten/Kota disebabkan penganggaran yang belum fokus pada dukungan pelaksanaan PSP, kurangnya inisiatif dalam melaksanakan program PMO, rendahnya tingkat kepedulian dari unsur pejabat dan sering terjadinya penggantian pejabat;
- 2 Masih rendahnya aktivitas belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) disebabkan beberapa guru dan kepala sekolah lupa akun belajar.id, dan kemampuan IT yang masih rendah;
- 3 Banyak satuan pendidikan yang belum menggunakan SIPLAH untuk pengadaan barang atau jasa;
- 4 Tidak semua kepala sekolah dan guru memahami fungsi dan manfaat platform pembelajaran (GWE) termasuk untuk Peserta Didik;
- 5 Kurang Optimalnya Pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran di Satuan Pendidikan;
- 6 Masih ada Satuan Pendidikan yang belum melakukan analisis Rapor Pendidikan, memahami mekanisme Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 7 Tidak ada regulasi terkait persentase minimal sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan masih adanya perbedaan pemahaman di pemda terkait regulasi SPM;
- 8 Terdapat perbedaan persepsi pemda terkait pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah (KSPS);
- 9 Pemda provinsi belum memiliki satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP);
- 10 Pemahaman terkait kebijakan Asesmen Nasional belum dipahami oleh seluruh Satuan Pendidikan, khususnya Satuan Pendidikan swasta;
- 11 Terdapat peserta didik aktif yang terdata sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 12 Belum optimalnya implementasi kebijakan transisi PAUD SD yang menyenangkan di Satuan Pendidikan;
- 13 Program pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi belum diterapkan di semua Satuan Pendidikan;
- 14 Program Gerakan Sekolah Sehat (GSS) belum menjangkau semua Satuan Pendidikan;
- 15 Pelayanan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kabupaten/kota belum maksimal; dan
- 16 Tata kelola dapodik di beberapa Satuan Pendidikan terkait kelengkapan, validitas dan ketepatan data belum optimal.

PERAN STRATEGIS

- 1 Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- 2 Mengembangkan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- 3 Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- 4 Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- 5 Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- 6 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan

- 7 Melaksanakan urusan administrasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Visi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2020-2024 ditentukan berdasar visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, visi Kemdikbudristek, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 serta visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan.

Visi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mewujudkan visi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbudristek yaitu untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

- Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen; dan
- Penguatan tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MATRIKS KINERJA

Dengan adanya perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan mengalami perubahan. Dibawah ini diuraikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

Target Kinerja LPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2021

Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target		
		PK 2020	PK 2021	
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75.	%	26,5	27,4
IKK 1.2	Presentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.	%	5	5
IKK 1.3	Presentase kab/kota yang memiliki Data Pokok Pendidikan dasar dan menengah Akurat, Terbaru, dan Berkelanjutan.	%	95	95,2
SK 2. Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik				
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi NTB	Predikat	BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	81	82

Target Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target			
		PK 2022	PK 2023	PK 2024	
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	30	35
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Predikat	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nilai	83	84	85

B. Program Prioritas 2020-2024

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung program prioritas Kemendikbudristek melalui program Merdeka Belajar, turut serta melaksanakan 8 (delapan) Episode Program Merdeka belajar yaitu:

1. EMPAT POKOK KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemendikbud.go.id

HARDIKNAS 2021

MERDEKA BELAJAR EPISODE 1

Hingga Maret 2020 sudah ada empat kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemdikbud, Nadiem Makarim atau yang disebut sebagai **Merdeka Belajar Episode 1 hingga Episode 4**. Diluncurkan pada 10 Desember 2019, kebijakan ini adalah penyesuaian sejumlah kebijakan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu:

- 1 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)**
 - Tahun 2020, USBN diganti dengan ujian (asesmen), yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.
 - Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.
 - Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.
- 2 Ujian Nasional**
 - Tahun 2021, UN berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
 - Berfokus pada tiga bidang, yaitu literasi, numerasi, dan karakter.
 - Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11).
 - Mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran.
 - Mengacu pada praktik baik pada asesmen internasional, seperti PISA dan TIMSS.
- 3 Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**
 - Guru bebas mengembangkan format RPP.
 - Minimal berisi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.
 - Penulisan RPP menjadi efektif dan efisien.
 - Guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran.
- 4 Fleksibilitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru**
 - Mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di daerah.
 - Jalur zonasi: minimal 50%, jalur afirmasi: minimal 15%, jalur perpindahan: maksimal 5%, prestasi: sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah.

1 kemdikbud.id | 2 kemdikbud.id | 3 kemdikbud.id | 4 kemdikbud.id | kemdikbud.go.id | jendala.kemdikbud.go.id

2. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemendikbud.go.id

HARDIKNAS 2021


MERDEKA BELAJAR EPISODE 3

Hingga Maret 2020 sudah ada empat kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemdikbud, Nadiem Makarim atau yang disebut sebagai **Merdeka Belajar Episode 1 hingga Episode 4**. Diluncurkan pada 10 Februari 2020, kebijakan berupa **perubahan mekanisme BOS** sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu:


- 1 Penyaluran BOS Langsung Ke Rekening Sekolah**
 - Tahapan penyaluran 3x per tahun.
 - Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, verifikasi data oleh pemerintah daerah.
 - Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus).
- 2 Penggunaan BOS Lebih Fleksibel Untuk Sekolah**
 - Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer (dengan syarat dan ketentuan berlaku).
 - Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan, apabila dana masih tersedia.
 - Tidak ada pembatasan alokasi untuk buku dan pembelian alat multimedia.
- 3 Nilai Satuan BOS Meningkat**
 - SD Rp. 900.000,- per siswa per tahun
 - SMP Rp. 1.300.000,- per siswa per tahun
 - SMA Rp. 1.500.000,- per siswa per tahun
- 4 Pelaporan BOS Diperketat**
 - Pelaporan dilakukan daring untuk meningkatkan akuntabilitas.
 - Wajib memublikasikan di papan informasi sekolah.

1 kemdikbud.id | 2 kemdikbud.id | 3 kemdikbud.id | 4 kemdikbud.id | kemdikbud.go.id | jendala.kemdikbud.go.id

3. PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id



HARDIKNAS 2021

MERDEKA BELAJAR EPISODE 7

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK


Sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan pendidikan Indonesia diawali dengan SDM kepala sekolah dan guru yang focus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic, sehingga terwujud Profil Pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak meliputi:

- Kolaborasi Kemendikbud dan pemda
- Intervensi secara holistik
- Mencakup seluruh kondisi sekolah, baik negeri maupun swasta dan tidak hanya sekolah unggulan.
- Pendampingan selama 3 tahun
- Terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah menjadi Sekolah Penggerak.






Sasaran Sekolah Penggerak adalah:

- Hasil belajar di atas rata-rata
- Lingkungan belajar nyaman, aman, inklusif, dan menyenangkan
- Pembelajaran berpusat pada siswa
- Refleksi diri dan pengimbasan



Ada lima intervensi Program Sekolah Penggerak

- Kerja sama Kemendikbud dengan pemda memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak.
- Penguatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan intensif dengan pelatih yang disediakan Kemendikbud.
- Pembelajaran dengan paradigma baru menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan siswa.
- Perencanaan berbasis data hasil refleksi diri satuan pendidikan.
- Penggunaan platform digital untuk mengurangi kompleksitas, menambah efisiensi, inspirasi, dan pendekatan yang sesuai kebutuhan.

 Kemdikbud.RI
  Kemdikbud_RI
  kemdikbud.ri
  KEMENDIKBUD RI
  kemdikbud.ri

4. SEKOLAH AMAN BERBELANJA BERSAMA SIPLAH



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id



HARDIKNAS 2021

MERDEKA BELAJAR EPISODE 12

SEKOLAH AMAN BERBELANJA BERSAMA SIPLah

Tahun 2019, Kemendikbud merilis Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk **melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring** yang anggarannya bersumber dari dana BOS.

Pada 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman **berbelanja dan berjualan yang lebih baik.**

Sekolah Aman Berbelanja

- Alur pembelajaran dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia
- Lebih banyak pilihan mitra pengiriman
- Fitur-fitur yang lebih lengkap, termasuk pembatalan transaksi, adua, serta *dashboard* pemantauan status transaksi

Penyedia Nyaman Berjualan

- Proses pendaftaran penyedia dalam 1x24 jam
- Pengecekan pembayaran otomatis
- Pembayaran diterima 1x24 jam setelah sekolah membayar



 Kemdikbud.RI
  Kemdikbud_RI
  kemdikbud.ri
  KEMENDIKBUD RI
  kemdikbud.ri

5. KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR KURIKULUM MERDEKA



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
kemdikbud.go.id

**MERDEKA
BELAJAR** | 15

KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR

✓ KURIKULUM MERDEKA

Dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu apakah akan menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), atau Kurikulum Merdeka.

Keunggulan Kurikulum Merdeka

- Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar jadi lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan
- Memberi kemerdekaan lebih kepada peserta didik, guru, dan sekolah dalam memilih pembelajaran yang sesuai
- Lebih relevan dan interaktif

Dukungan penerapan Kurikulum Merdeka untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan diberikan berupa penyediaan perangkat ajar yaitu buku teks dan bahan ajar pendukung; pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah; dan jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru

✓ PLATFORM MERDEKA MENGAJAR

Ada tiga jenis kegiatan yang bisa dilakukan guru dengan Platform Merdeka Mengajar, yaitu Mengajar, Belajar, dan Berkarya

- Mengajar
Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- Belajar
Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun
- Berkarya
Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik

Pada fitur Bukti Karya Saya, guru dapat membangun portfolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi



6. RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
kemdikbud.go.id

**MERDEKA
BELAJAR** | 19

RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA

Apa itu Rapor Pendidikan Indonesia?

- Rapor Pendidikan diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan melaporkan kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan
- Platform ini menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi
- Rapor Pendidikan menyajikan informasi mengenai kualitas dan ketimpangan secara sederhana dan mudah dipahami

Isi Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 Standar Nasional Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran

- Input: Standar GTK, Standar Sarpras, Standar Pembiasaan
- Proses: Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan
- Output: Standar Kompetensi Lulusan

Perbedaan evaluasi pendidikan dahulu dengan sekarang

- Dahulu:
 - Berbagai sumber dan melakukan pengisian borang berkali-kali
 - Hasilnya evaluasi yang beragam
 - Mengukur beragam hal
- Sekarang:
 - Hanya AN dan Dipodik serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi
 - Evaluasi hanya satu
 - Mengukur hal yang kunci, yaitu mutu dan pemerataan hasil belajar

Cara mengakses Rapor Pendidikan

- Sekolah dan Dinas Pendidikan, dengan mengaktifkan akun pembelajaran di belajar.id
- Masyarakat, dengan mengakses dan mempelajari capaian satuan pendidikan dan daerah di raporpendidikan.kemdikbud.go.id/rapp



7. TRANSAKSI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

MERDEKA BELAJAR 24

TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

*SD = SD/MI dan Paket A

Satuan pendidikan perlu:

- Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada SD
- Menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama dua Minggu pertama (di PAUD dan SD)
- Menerapkan pembelajaran yang membangun enam fondasi anak (PAUD dan SD)

Enam Kemampuan Fondasi Anak

- Mengenal nilai agama dan budi pekerti
- Keterampilan sosial dan bahasa
- Kematangan emosi
- Kematangan kognitif
- Keterampilan motorik dan perawatan diri
- Pemaknaan terhadap belajar yang positif

Kemampuan fondasi tersebut dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada jenjang Sekolah Dasar

Pada Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran untuk kelas awal pendidikan dasar sudah disusun selaras dengan PAUD. Buku teks Kurikulum Merdeka sudah dikurasi sehingga anak tidak perlu bisa calistung saat masuk di kelas 1 pada Sekolah Dasar.

Kemendikbudristek mengajak berbagai pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam gerakan ini:

- Peran dinas adalah mendiseminasikan surat edaran dan mendampingi satuan PAUD dan SD atau MI di wilayah Kabupaten atau kota
- Peran satuan pendidikan adalah belajar bersama untuk terwujudnya tiga perubahan mulai dari tahun ajaran baru. Satuan pendidikan dapat melaporkan perubahan yang sudah dilakukan melalui Aksi Nyata di kanal kementerian
- Peran orang tua adalah mendampingi anak-anak dengan bekal buklet Penguatan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dan video inspirasi di laman Transisi PAUD-SD
- Para mitra dapat melatih sekolah atau Komunitas guru dampungannya agar menguatkan gerakan belajar bersama untuk penguatan transisi PAUD-SD sebelum tahun ajaran baru dan sepanjang pembelajaran di sekolah

Kementerian menyediakan alat bantu bagi satuan pendidikan untuk menjalankan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang dapat diakses di Platform Merdeka Mengajar (budi.kemdikbud.go.id) dan laman transisi PAUD-SD: s.id/transisipauds

Kemdikbud.RI | Kemdikbud_RI | kemdikbud.ri | KEMENDIKBUD RI | kemdikbud.ri

8. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

MERDEKA BELAJAR 25

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKSP) di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokus terbesarnya adalah implementasi yang efektif, menggunakan data, dan melibatkan berbagai pihak.

Peraturan ini menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015, regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Permen PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, dan tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan potensinya.

- Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan
- Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan yang mungkin terjadi
- Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan (satgas) oleh pemerintah daerah diatur lebih rinci
- Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefiniskan dengan jelas
- Pembagian dan alur koordinasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan lebih jelas antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek

Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Perundungan
- Kekerasan seksual
- Diskriminasi dan intoleransi
- Kebijakan yang mengandung kekerasan

Keenam kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/online)

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN

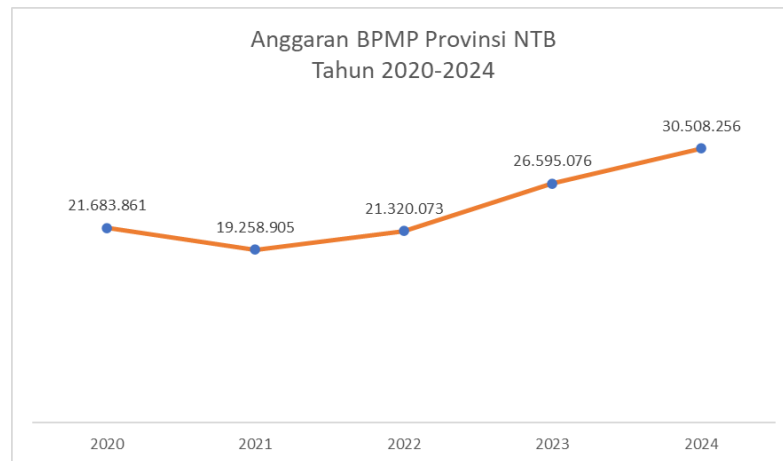
Kemdikbud.RI | Kemdikbud_RI | kemdikbud.ri | KEMENDIKBUD RI | kemdikbud.ri

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

No.	Nama Program Prioritas	Target 2024	Satuan	Alokasi Anggaran 2024
1	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya.	4.797	Lembaga	11.392.717.000
2	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya.	5.154	Lembaga	214.000.000

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyusun rencana kerja dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024.



Dengan adanya perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, anggaran tahun 2020 dan 2021 ada di satker LPMP Provinsi NTB sedangkan anggaran di tahun 2022 sampai dengan 2023 ada di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target 2024	Satuan	Alokasi Anggaran 2024
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran.	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya.	4.797	Lembaga	11.392.717.000
				Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya.	5.154	Lembaga	214.000.000
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1	Dokumen	10.000.000
			Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan Umum	1	Layanan	486.585.000
			Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan Perkantor	1	Layanan	16.456.354.000
			Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1.948.600.000

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target		%	
		Renstra	PK		
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	%	3,92	3,92	100
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	%	35,00	72,70	207,71
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Predikat	A	A	100
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Nilai	85	97,77	115,02

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Terdapat perbedaan target antara target PK 2024 dan target renstra 2024 pada IKK 1.2 dan IKK 2.2, hal ini dikarenakan di tahun 2023 realisasi pada kedua IKK tersebut telah melebihi target renstra 2024. Realisasi IKK 1.2 di tahun 2023 sebesar 63,64 dan realisasi IKK 2.1 di tahun 2023 sebesar 97,55.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

Perjanjian Kinerja 2024 (Awal).

Sasaran Kegiatan/Indikator		Target Perjanjian Kinerja 2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen		
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	72,70
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat		
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	97,77

Kode	Nama Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Rp. 17.768.006.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.	Rp. 11.711.035.000

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Revisi dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran.

Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi).

Sasaran Kegiatan/Indikator		Target Perjanjian Kinerja 2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen		
IKK 1.1	Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	72,70
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat		
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	97,77

Kode	Nama Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Rp. 18.901.539.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.	Rp. 11.606.717.000



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan indikator kinerja IKK 1.1. Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dan IKK 1.2. Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Berikut informasi ketercapaiannya selama tahun 2024.

Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	%	3,92	11,93	304,32%
IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	%	72,70	100	137,55%
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat				
IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Predikat	A	A	100%
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Nilai	97,77	98,33	101,08%

1. SASARAN KINERJA 1 :

Meningkatnya Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses Pendidikan. Hasil penilaian proses pendidikan dapat dilakukan secara internal melalui evaluasi diri sekolah dan secara eksternal melalui penilaian akreditasi satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang mengalami peningkatan mutu pembelajaran terukur dari hasil akreditasi yang masuk katagori Unggul (A), Baik (B), dan Cukup (C).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya.

Definisi Operasional Indikator Kinerja 1.1 adalah persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil akreditasi sekolah.

Cara perhitungan Indikator Kinerja 1.1:

$$Realisasi = \frac{\sum \text{satuan PAUD dan dikmas yang mengalami peningkatan capaian akreditasi}}{\sum \text{satuan PAUD dan DIkmas pada provinsi/ kab/ kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Berdasarkan sumber data dari BSKAP (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan untuk jenjang PAUD, dari 4.971 sekolah jenjang PAUD terdapat 593 satuan Pendidikan yang meningkat mutu pembelajarannya diperoleh persentase penghitungannya adalah :

$$Realisasi = \frac{593}{4.971} \times 100\% = 11,93\%$$

Berikut adalah tren persentase capaian kinerja dari tahun 2022-2024 dan analisis perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra.

	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	0,98 %	1,96 %	3.92 %
Realisasi	3,78 %	2,01 %	11,93 %
%	386 %	103 %	304,32 %

Berdasarkan data tabel diatas, diperoleh gambaran capaian realisasi selalu diatas target yang ditetapkan. Meskipun capaian realisasi selalu diatas target, namun untuk tren/kecendrungan capaian mengalami fluktuasi. Tahun 2024 capaian persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mengalami peningkatan menjadi 11,93% dibandingkan 2023.

PAUD dalam kelembagaannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu PAUD formal atau TK dan PAUD non formal (Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak dan sederajat) antara lain: (1) Taman Kanak-Kanak (TK); (2) Taman Penitipan Anak (TPA); (3) Kelompok Bermain (KB); dan (4) Satuan PAUD Sejenis yang perlu ditingkatkan mutunya. Mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses Pendidikan. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Advokasi perbahan pembelajaran di SD/MI & PAUD, utamanya SD.;



- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mitra tentang perubahan pembelajaran;



- Tindak lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP untuk penguatan perubahan pembelajaran;
- Penguatan Kapasitas UPT untuk melakukan advokasi Pelaksanaan Metode Pembelajaran Transisi PAUD-SD;



- Koordinasi kemitraan berkala dengan mitra daerah;
- Sosialisasi dan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivasi Forkom PAUD-SD;



- Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan;



- Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Kanwil Kemenag;
- Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan; dan
- Melakukan Observasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 2 pekan.

Berikut adalah faktor penyebab keberhasilan meningkatnya persentase dari satuan PAUD dan Dikmas yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya:

- Adanya koordinasi dan kepedulian orangtua siswa selama masa MPLS;
- SD Negeri sudah semakin memahami bahwa calistung bukan satu satunya indikator ketercapaian tetapi ada kemampuan pondasi lain yg perlu terbangun dengan baik sesuai perkembangan anak; dan
- Keterlibatan bunda PAUD dan Pokja bunda PAUD serta mitra daerah berdampak positif bahwa pendidikan tanggungjawab semua pihak.

Indikator Kinerja 1.1 terkait kebijakan Merdeka belajar episode ke 24 yaitu Transisi PAUD Ke SD yang menyenangkan. Dalam pemenuhan kebijakan Merdeka Belajar tersebut mengalami hambatan/permasalahan antara lain: masih terjadi miss konsepsi dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, belum merata informasi tersampai ke satuan Pendidikan, pendidik masih berfokus ke baca dan tulis, peserta didik belum aktif dalam proses belajar mandiri melalui media online berupa PMM atau laman, pemda (Dinas Pendidikan) tidak aktif memahami terkait kebijakan penguatan pembelajaran 6 kemampuan fondasi, satuan pendidikan di pedesaan belum mendapatkan informasi tiga target perubahan, belum efektifnya keberadaan Forkom guru Paud dan SD, beberapa satuan pendidikan swasta jenjang SD masih melakukan tes calistung saat PPDB, belum efektifnya keberadaan Forkom guru Paud dan SD, MPLS belum terlaksana dengan baik, masih terdapat pelaksanaan MPLS kurang dari 2 minggu dan tidak melakukan asesmen awal pada saat MPLS.

Antisipasi telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan pada target kinerja IKK 1.1. hal yang dilakukan pertama adalah sosialisasi pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan agar melakukan asesmen awal pada saat MPLS. Selanjutnya dilakukan advokasi satuan pendidikan swasta jenjang SD yang masih melakukan tes calistung saat PPDB. Setelah advokasi dilakukan, diperkuat dengan persamaan persepsi dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, penyebaran informasi melalui berbagai kanal agar tersampaikan ke satuan Pendidikan, pendidik memperkaya kompetensi tidak hanya calistung, tetapi metode dan teknik lainnya, peserta didik aktif dalam proses belajar mandiri melalui media online berupa PMM atau laman, pemda (Dinas Pendidikan) aktif memahami terkait kebijakan penguatan pembelajaran 6 kemampuan fondasi melalui berbagai media, dan mengefektifkan keberadaan Forkom guru Paud dan SD. Akhir dari antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yaitu dengan melakukan pemantauan pelaksanaan MPLS agar terlaksana dengan baik.

Strategi pencapaian target kinerja tahun 2024 dengan melakukan siklus penjaminan mutu Pendidikan berkelanjutan sebagai berikut :



Berdasarkan capaian kinerja pada IKK 1.1 terjadi peningkatan realisasi di tahun 2024. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain: adanya Koordinasi dan kepedulian pengambil kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan TPSDM, telah terbangun Komunikasi yang intensif antara seluruh pemangku kepentingan, telah terjadi Pelibatan seluruh unsur terkait dalam pemenuhan target capaian, telah terlaksana Pelatihan dan pembekalan substansi kegiatan dan Pendampingan implementasi pemahaman 6 (enam) kemampuan fondasi.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.2

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

Definisi Operasional Indikator Kinerja 1.2 adalah persentase Jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

Cara perhitungan Indikator Kinerja 1.2:

$$Realisasi = \frac{\sum \text{Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Rapor Pendidikannya}}{\sum \text{Kabupaten/Kota di Provinsi NTB}} \times 100\%$$

Berdasarkan sumber data dari BSKAP (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan) untuk jenjang Dikdas dan Dikmen, yang dianalisis berdasarkan indeks capaian SPM tahun 2024 diketahui untuk tahun 2024 target capaian sebesar 72,70, Realisasi 100% jadi persentase kinerja sebesar 137,55%.

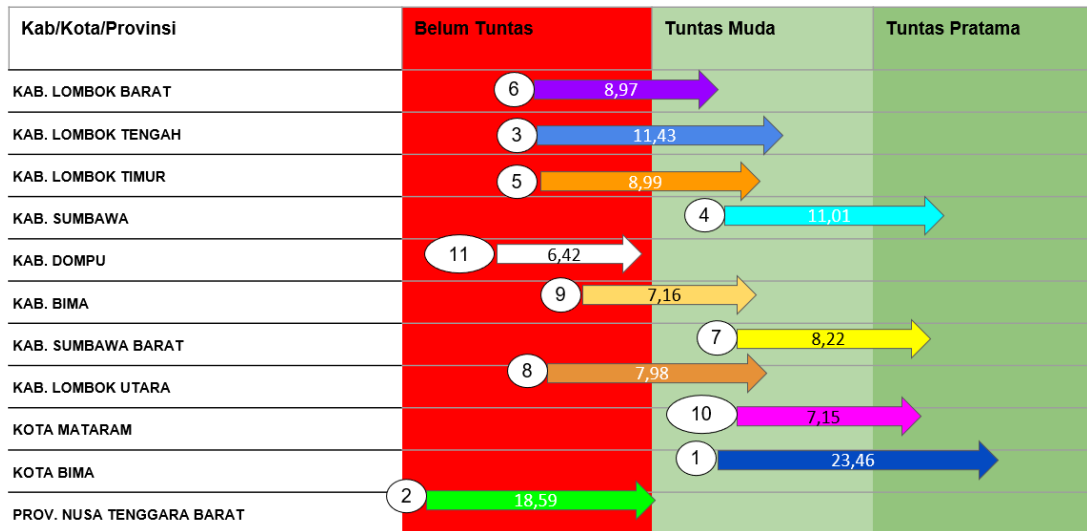
Tren capaian kinerja dari tahun 2022-2024 dan analisis perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra diperoleh gambaran capaian sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	25,00%	30,00%	72,70%
Realisasi	45,00%	63,64%	100%
%	180%	212%	137,55%

Realisasi Peningkatan hasil rapor Pendidikan tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi berdasarkan persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Berdasarkan data tabel diatas, diperoleh gambaran capaian realisasi selalu diatas target yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut diatas, maka tren IKK 1.2 kecenderungan mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Satuan pendidikan yang didampingi dalam perbaikan mutu pembelajaran melalui profil dan rapor pendidikan. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran ke satuan pendidikan di wilayahnya. Pemanfaatan profil dan Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik yang didukung dengan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu, profil dan rapor pendidikan akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam memfasilitasi perencanaan penganggaran, pelaksanaan pembelajaran dan penatausahaan di sekolah.

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan rapor pendidikan nya, Rapor Pendidikan Kabupaten/Kota dapat digambarkan pada pemenuhan SPM dalam gambar sebagai berikut:



Sumber data: BSKAP 2024

Berdasarkan data table diatas, maka diperoleh informasi bahwa sebanyak 10 kabupaten kota dan 1 provinsi telah mengalami peningkatan capaian SPM. Peningkatan capaian SPM tersebut berdasarkan pada peningkatan capaian rapor Pendidikan di 10 Kabupaten/Kota dan Provinsi. Rapor Pendidikan mengukur tentang kemampuan literasi, kemampuan numerasi, proporsi PTK, kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, iklim keserataan gender, partisipasi orangtua, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, dan program dan kebijakan sekolah. Indikator Rapor Pendidikan ini tertuang dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



- Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP Angkatan I dan Sekolah Imbas
- Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1
- Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah

- Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satuan Pendidikan
- Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan
- Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP Menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP
- Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan non-PMM
- Kunjungan Lapangan dan Wawancara terkait Adaptasi Kurikulum
- Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel
- Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait Optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping Satuan Pendidikan

PROGRAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA



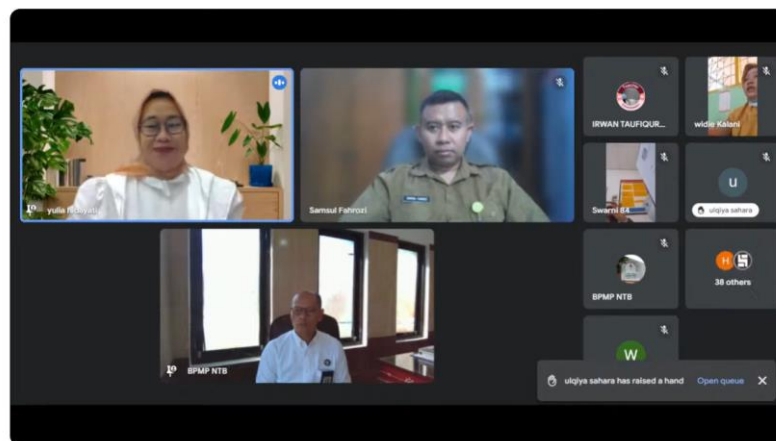
- Advokasi peningkatan kualitas proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka
- Pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka
- Persiapan Festival Kurikulum Merdeka
- Festival Kurikulum Merdeka
- Pemberian penghargaan penyelenggara Festival Kurikulum Merdeka

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK SDS



- Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan terkait Fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLAH
- Bimtek Pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait Penggunaan Fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLAH
- Advokasi Pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait Penggunaan Fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLAH
- Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan terkait Fitur Rencana Belanja Integrasi ARKAS-SIPLAH
- Bimtek Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024
- Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Penggunaan ARKAS 4.0 BOP dan Pelaporan BOSP Melalui ARKAS Tahap I Tahun 2024
- Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR
- Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR
- Sosialisasi dan Advokasi Pemerintah daerah dan Satuan Pendidikan terkait Perencanaan Penggunaan BOSP pada T-1

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PEMBELAJARAN



Webinar Seri 1 "Kreasi dan Inovasi Bernilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Memanfaatkan TIK"

bpmptnb
5.07K subscribers

Subscribed

76

Share

Download

- Advokasi Pemerintah Daerah untuk Transformasi Digital dalam pembelajaran
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi Belajar.id
- Advokasi Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi belajar.id Tahap 2
- Rapat Koordinasi Pendamping Pemanfaatan TIK
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Komunitas Belajar.id

- Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) Seri 1, 2 dan 3.

RAPOR PENDIDIKAN DAN PBD UNTUK SATUAN PENDIDIKAN



- Advokasi Aktivitas Komunitas Belajar PBD dan Gap Analisis dalam rangka tranformasi Satuan Pendidikan
- Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Rangka Transformasi Satuan Pendidikan kepada pemerintah Daerah tahun 2024
- Pendampingan Pemanfaatan Papor Pendidikan bagi Satuan Pendidikan tahun 2024 (di masing Kab/Kota se NTB)
- Pemantauan Hasil Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Rangka Transformasi Pendidikan Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2024
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan Oleh UPT Di Wilayah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2024

RAPOR PENDIDIKAN DAN PBD UNTUK PEMDA DAN PUBLIK



- Pendampingan Perencanaan Daerah terkait SPM Pendidikan oleh UPT
- Pendampingan Penganggaran Daerah terkait SPM Pendidikan oleh UPT
- Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT

KEMITRAAN DAERAH DAN ADVOKASI



- Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah
- FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak
- Pendampingan PPDB Daerah
- Pemantauan Pelaksanaan PPDB
- Pengolahan hasil pemantauan
- Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB
- FGD Identifikasi issue (PAUD)
- FGD Penyusunan strategi advokasi
- FGD Persiapan Bimtek Penguatan PPKSP
- Bimtek PPKSP

ASESMEN NASIONAL



- Pembekalan dan Penyamaan Persepsi Calon Narasumber Workshop AN dan UK
- Workshop Kebijakan AN dan UK
- Advokasi dan Monev Persiapan AN dan UK
- Monev Pelaksanaan AN dan UK
- Pengolahan dan Analisis Data Hasil Monev Persipan dan Pelaksanaann AN dan UK
- Pembekalan dan Penyamaan Persepsi Calon Narasumber Workshop UK dan UK

TRANSFORMASI TATA KELOLA DAN REGULASI



- Advokasi di Desa Tumpak dan Rembitan Kabupaten Lombok Tengah
- Advokasi di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara
- Advokasi Penanganan ATS Satuan Pendidikan di Kemenag Kab Lobok Utara

PEMULIHAN PEMBELAJARAN



- Monitoring dan evaluasi Program Pemulihan dan Tranformasi Pembelajaran di semua jenjang
- Sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah PDM-10 oleh UPT
- Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I dan II
- Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT
- Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT
- Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT

GERAKAN SEKOLAH SEHAT



- Koordinasi UPT dengan Dinas Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Kampanye Sekolah Sehat dari UPT ke Pengawas dan TP UKS
- Mengadakan kegiatan Pendampingan GSS bagi sekbin tahun 2023 dan tahun 2024
- Pendampingan/Supervisi/visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan (satpen binaan 2023 dan 2024)
- Refleksi dan Evaluasi Implementasi GSS di Satuan Pendidikan Binaan Sekbin GSS tahun 2024
- Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) ke Satuan Pendidikan dan Pendampingan implemtasi GSS di SEKbin GSS 2024 (2 Kegiatan jadi Satu)
- Koordinasi UPT dengan Dinas Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Kampanye Sekolah Sehat dari UPT ke Pengawas dan TP UKS Provinsi dan Kab/Kota

PENDIDIKAN INKLUSI



- Rapat Koordinasi Terpadu Program Prioritas Kemdikbudristek
- Advokasi ke pemda terkait Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif
- Desiminasi pemanfaatan PMM untuk pelatihan inklusif berjenjang Dasar

- Desiminasi capaian keikutsertaan Guru dan Satuan Pendidikan
- Pendampingan pemanfaatan PMM ke daerah
- Sosialisasi Pembentukan ULD

Indikator Kinerja 1.2 terkait beberapa kebijakan Merdeka belajar yaitu: Episode ke 1 yaitu 4 kebijakan (mengganti UN menjadi AN, Menghapus USBN, penyederhanaan RPP dan penyesuaian Kuota jalur prestasi PPDB berbasis Zonasi; Episode ke 3 terkait perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS; Episode ke 7 terkait Program Sekolah Penggerak; Episode ke 12 terkait sekolah aman berbelanja bersama SIPLah; Episode ke 15 terkait Kurikulum dan Platform Merdeka Mengejar; Episode ke 19 terkait Rapor Pendidikan Indonesia; Episode ke 25 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan. Ke tujuh kebijakan Merdeka Belajar telah berhasil dilaksanakan. Hal hal yang menunjukkan keberhasilan tersebut antara lain:

- Terkait Episode ke 1 (4 kebijakan (mengganti UN menjadi AN, Menghapus USBN, penyederhanaan RPP dan penyesuaian Kuota jalur prestasi PPDB berbasis Zonasi;) keberhasilan kebijakan ditandai dengan telah terlaksana Advokasi persiapan AN ke satuan pendidikan yang belum memadai atau belum mengikuti AN
- Terkait Episode ke 3 (Perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS) dan Episode 12 (Sekolah aman berbelanja dengan SIPLah), keberhasilan kebijakan ditandai dengan terbangun Komunikasi dan koordinasi Tim PDMO 3A dengan Tim Manajemen BOS dan Tim Markas Dinas Pendidikan; Pelaksanaan Bimtek yang melibatkan narasumber pusat; Pendampingan satuan pendidikan oleh Tim MARKAS
- Terkait Episode ke 7 (Program Sekolah Penggerak), keberhasilan kebijakan ditandai dengan beberapa pemda (dinas pendidikan dan kebudayaan) mulai melakukan berbagi praktik baik dalam mendukung pelaksanaan PSP; Beberapa pemda mengadopsi pola pelaksanaan PSP dan melakukan duplikasi kegiatan seperti memfasilitasi pengimbasan oleh sekolah pelaksana PSP ke sekolah sekitar dan memberi dukungan dana; Pemda melakukan lokakarya dan refleksi pelaksanaan PSP dan pengimbasan Pemda memberikan penghargaan bagi sekolah-sekolah yang memiliki inovasi dalam pelaksanaan intervensi PSP; Sekolah pelaksana PSP berinisiatif berbagi praktik baik ke sekolah sekitar; Sekolah pelaksana mulai menggiatkan aktivitas kombel intrasekolah secara rutin; dan Terbentuknya komunitas belajar baik dalam sekolah maupun antar sekolah
- Terkait Episode ke 15 (Kebijakan Merdeka Belajar dan Platform Merdeka Mengajar), keberhasilan kebijakan ditandai dengan Seluruh Pemerintah Daerah (11 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi) telah mengeluarkan edaran tentang optimalisasi akun akses layanan pendidikan, platform pembelajaran dan peralatan TIK); telah membentuk PemanTIK dan atau Komite PemanTIK; Telah terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik di antara PemanTIK Daerah, Kapten dan Co-Kapten, serta Komunitas Belajar.id di Provinsi NTB; Semua Satuan pendidikan sudah mengakses Platform Rapor Pendidikan dan menggunakannya untuk proses perencanaan; Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur) meraih Predikat Daerah Pelopor Transformasi Digital dalam Pembelajaran dengan Kategori

Daerah Maju; dan Pemerintah Daerah lainnya di Provinsi NTB (Dinas Pendidikan) meraih Predikat Daerah Pelopor Transformasi Digital dalam Pembelajaran dengan Kategori Daerah Berkembang

- Terkait Episode ke 19 (Rapor Pendidikan Indonesia) keberhasilan kebijakan ditandai dengan Seluruh GTK di setiap satuan Pendidikan sudah memiliki akses terhadap rapor pendidikan dan menjadikan capaian rapor pendidikan sebagai dasar dalam mengevaluasi dokumen perencanaan; Dinas Pendidikan, komunitas belajar semakin sering berkoordinasi dengan BPMP terkait Rapor Pendidikan untuk satuan Pendidikan; Sebagian besar Satuan Pendidikan sudah memahami 8 Aksi IRBB dalam melaksanakan PBD; Semua dinas pendidikan sudah mengakses Platform Rapor Pendidikan dan menggunakannya untuk proses perencanaan; 8 dari 11 Bappeda sudah memiliki akses terhadap rapor pendidikan dan menjadikan capaian rapor pendidikan sebagai dasar dalam mengevaluasi dokumen perencanaan OPD; 5 dari 11 BPKAD sudah mengakses rapor Pendidikan; Bappeda dan BPKAD semakin sering berkoordinasi dengan BPMP terkait SPM Pendidikan; Sebagian besar dinas sudah memahami indikator dan sub kegiatan SPM; Secara umum alokasi sub kegiatan SPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya; Sosialisasi dan advokasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak pengambil kebijakan dan Keberterimaan pemda kepada UPT telah sangat baik
- Terkait Episode ke 25 (pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan) keberhasilan kebijakan ditandai dengan seluruh dinas Pendidikan telah membentuk Satgas TPPK dan di level satuan Pendidikan telah sebagai besar memiliki tim TPPKSP, telah terlaksana dan didesiminasikan oleh satuan Pendidikan dan dinas Pendidikan praktik baik pelaksanaan kebijakan PPKSP

Hal-hal yang menunjukkan hambatan/permasalahan yang terjadi adalah: masih terjadi miskonsepsi dalam pemaknaan kebijakan Merdeka Belajar, belum merata informasi tersampaikan ke Satuan Pendidikan, belum terinternalisasikan kebijakan Merdeka Belajar secara menyeluruh di Satuan Pendidikan masih terdapat unsur Pemda (Dinas Pendidikan) tidak aktif memahami terkait kebijakan Merdeka Belajar, belum efektifnya keberadaan komunitas belajar baik pendidik maupun tenaga kependidikan, serta komunikasi dengan dinas pendidikan maupun *stakeholder* pendidikan lainnya belum dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hambatan atau permasalahan yang dihadapi untuk mencapai Indikator Kinerja 1.2, beberapa Langkah antisipasi yang dilakukan antara lain: Pola pengimbasan yang perlu diatur sehingga berjalan efektif baik dari segi frekuensi pelaksanaan, sekolah pelaksana pengimbasan, sasaran sekolah imbas, dan materi pengimbasan, Sekolah imbas perlu mendapatkan sosialisasi tentang pengimbasan terlebih dahulu sehingga baik sekolah pengimbas maupun sekolah imbas memiliki visi yang sama tentang pengimbasan; Perlu monitoring dan evaluasi dampak dan tindak lanjut pengimbasan oleh sekolah imbas, Pola pengimbasan yang perlu diatur sehingga berjalan efektif baik dari segi frekuensi pelaksanaan, sekolah pelaksana pengimbasan, sasaran sekolah imbas, dan materi pengimbasan, Optimalisasi pendampingan pada komunitas belajar, Optimalisasi peran pengawas dalam implementasi Kurikulum Merdeka, Optimalisasi desiminasi dengan

berbagi praktek baik, Optimalisasi Peran Komunitas Sobat ARKAS yang berada di Kabupaten/Kota/Provinsi; Pemantauan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah disusun oleh peserta Bimtek; Pendampingan satuan pendidikan oleh Tim BPMP dengan pelibatan Komunitas Sobat ARKAS; Hubungan/koordinasi/komunikasi antara Pengelola Markas dan Pengelola SIPD; Peningkatan frekuensi berbagi praktik baik antar Daerah melalui talenta digital yang ada (PemanTIK, Kapten dan Co-Kapten serta Komunitas Belajar.id); Pelibatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dalam menentukan kriteria dan penerima bantuan peralatan TIK baik melalui skema APBN maupun DAK TIK; Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pengelolaan akun belajar.id bagi admin/pengelola akun belajar.id sekolah; Peningkatan frekuensi berbagi praktik baik antar Daerah melalui talenta digital yang ada (PemanTIK, Kapten dan Co-Kapten serta Komunitas Belajar.id); Waktu peluncuran data Rapor pendidikan untuk satuan pendidikan dipercepat, Timeline pelaksanaan kegiatan masih perlu menyesuaikan dengan timeline perencanaan di satuan Pendidikan, Penguatan kornel dan satuan pendidikan dalam memahami PDB dilakukan secara kontinyu, Waktu peluncuran data Rapor pendidikan dipercepat, Timeline pelaksanaan kegiatan masih perlu menyesuaikan dengan timeline perencanaan di daerah, Perlu sinkronisasi data capaian SPM versi Kemdikbud dan Kemendagri, Perlu sinkronisasi antar sub kegiatan SPM versi Kemdikbud dan Kemendagri, Unsur peserta yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan, Sosialisasi kebijakan-kebijakan kementerian dilakukan untuk semua unsur pengambil kebijakan, Perlu ada posko bersama sehingga memudahkan koordinasi antar tim teknis, Perlu adanya pemetaan daerah-daerah atau satuan pendidikan yang belum memadai atau belum mengikuti AN sehingga dapat diberikan bentuk advokasi yang sesuai, Baru Melakukan Advokasi terhadap Operator Satuan Pendidikan Kementerian Agama, di tiap kecamatan di KLU, Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai strategi penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT, Pemberdayaan pengawas sekolah untuk melakukan pendampingan literasi dan numerasi di sekolah binaan.

Strategi pencapaian target kinerja tahun 2024 dengan melakukan siklus penjaminan mutu Pendidikan berkelanjutan sebagai berikut :



Berdasarkan capaian kinerja pada IKK 1.2 terjadi peningkatan realisasi di tahun 2024. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain: Koordinasi dan kepedulian pengambil kebijakan dalam pelaksanaan KMB, Komunikasi yang intensif antara seluruh pemangku kepentingan, Pelibatan seluruh unsur terkait dalam pemenuhan target capaian, Pelatihan dan pembekalan substansi kegiatan dan pelaksanaan pendampingan implementasi kebijakan.

2. SASARAN KINERJA 2 :

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periodisasi Renstra 2020 - 2024 mengalami perbaikan secara signifikan. Perbaikan tatakelola tersebut dibuktikan dari dinobatkannya LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. Bukti adanya perbaikan tatakelola di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terlihat dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang semakin meningkat kualitasnya. Sesuai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan internal oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori/predikat "A" pada kisaran nilai angka >80-90 dengan interpretasi **"Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel"**.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Tujuan dari pelaksanaan SAKIP adalah:

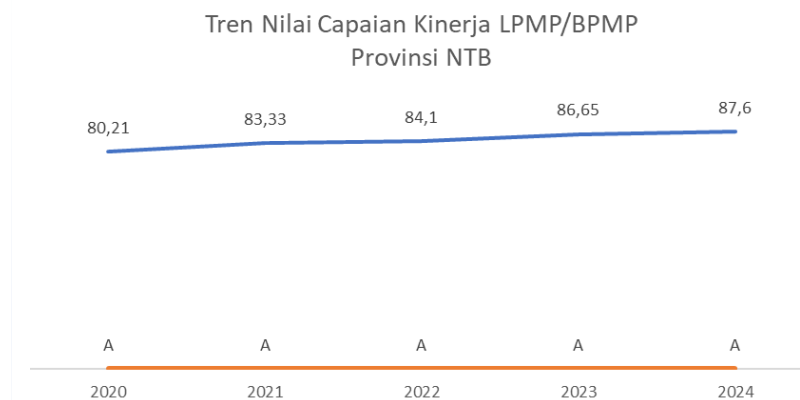
- Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;
- Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
- Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor;
- Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja); dan
- Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Indikator Capaian nilai SAKIP diperoleh komponen/subkomponen/kriteria berdasarkan:

- ▶ Perencanaan Kinerja (30%)
- ▶ Pengukuran Kinerja (30%)
- ▶ Pelaporan Kinerja (15%)
- ▶ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja SAKIP tahun 2023, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam kategori A dengan nilai: 86,65 dengan interpretasi: Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel. Target dan realisasi di tahun 2024 adalah sesuai LHE (Lembar Hasil Evaluasi) yaitu pada nilai 87,60 dengan kategori A. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami peningkatan 0,95.

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terlihat pada tren capaian nilai akuntabilitas kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 berikut:



Berdasarkan tren tersebut, hingga periodisasi akhir renstra capaian kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai kategori A dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

PROGRAM/KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mendukung pencapaian Predikat SAKIP periode 2020-2024 sebagai berikut:

- ▶ Melakukan rapat tim SAKIP untuk evaluasi program Triwulan;



- Melaporkan Capaian Kinerja melalui aplikasi SPASIKITA tepat waktu;
- Pembahasan LKE ZI-WBK dan persiapan penilaian ZI-WBK menuju WBBM;
- Melaporkan Capaian Output di Aplikasi SAKTI sebelum 5 hari kerja bulan berikutnya;
- Melaporkan Capaian Kinerja (Pengukuran Kinerja) melalui aplikasi SPASIKITA tepat waktu;
- Evaluasi dan pendampingan dokumen ZI WBK menuju WBBM, yang difasilitasi narasumber dari Ditjen Paud Dikdasmen dengan peserta dari seluruh pegawai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengikuti kegiatan pendampingan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- Penyusunan Reviu Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
- Penyusunan PK Revisi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Pengumpulan data dukung kinerja secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh satuan kerja;
- Pelaksanaan kegiatan prioritas lembaga sudah melampaui target yang ditetapkan (penjabaran ada di Bab III); dan
- Pelibatan unsur pimpinan dalam implementasi program prioritas lembaga berjalan dengan baik.

FAKTOR PENDUKUNG

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi sudah dilaksanakan sesuai prosedur;
- Aktivitas penginputan penyusunan laporan tiap triwulan secara konsisten;
- Tindak lanjut oleh Pimpinan dan staf dalam menyikapi perubahan terkait regulasi tentang BPMP dilaksanakan dengan baik;
- Evaluasi tim SPI secara berkala; dan
- Pembentukan Tim Kerja internal, terdiri dari:
 1. Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Tim Reviu Laporan Kinerja; dan
 3. Tim Evaluasi Internal.

HAMBATAN

Hambatan atau kendala yang dihadapi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Adanya perbedaan persepsi terhadap pola penetapan tim kerja yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan;

- ▶ Pemahaman terkait perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional lembaga; dan
- ▶ Pemanfaatan media pengumpulan data kinerja secara *online* belum digunakan dengan optimal.

LANGKAH ANTISIPASI

Langkah antisipasi yang dilakukan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghadapi kendala tersebut, sebagai berikut:

- ▶ Melakukan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Ditjen PAUDDIKASSEMEN kepada seluruh ASN di lingkungan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- ▶ Melakukan penguatan kapasitas SDM secara internal di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;



- Mengusulkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan SAKIP yang diselenggarakan Pusdiklat Kemendikbudristek; dan



- Optimalisasi pemanfaatan media pengumpulan data kinerja *online* oleh semua tim kerja.

STRATEGI

Strategi yang sudah dilakukan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- Mempelajari dan memahami Perjanjian Kinerja Kepala;
- Menyusun SKP masing-masing pegawai berbasis PK Kepala berdasarkan PermenPANRB nomor 6 Tahun 2022;
- Mempelajari dan mengikuti sosialisasi tentang PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 sehingga diperoleh pemahaman dalam melaksanakan evaluasi AKIP;
- Mempelajari dan menelaah dokumen DIPA dan RKA-K/L;
- Mereviu Renstra LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 menjadi Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024;
- Menyesuaikan semua dokumen kinerja seperti perjanjian kinerja, rencana aksi dengan menggunakan IKK terbaru;
- Mengumpulkan data dukung dari masing-masing tim kerja atas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- Melakukan penginputan capaian pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA sebelum batas waktu yang ditentukan;
- Melakukan koordinasi dan memantau informasi penyusunan Laporan kinerja melalui WAG baik yang dibentuk oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Setditjen PAUDDIKDASMEN sehingga apabila ada informasi-informasi terkait dapat segera ditindaklanjuti;

- ▶ Pertemuan rutin tim kerja dengan unsur pimpinan;
- ▶ Melaksanakan reviu Renstra BPMP 2020-2024;
- ▶ Menyusun draft Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 pada bulan Desember 2024; dan



- ▶ Melaksanakan Finalisasi dan Reviu Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 pada bulan Januari 2025.



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Unsur nilai kinerja anggaran terdiri dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Sedangkan nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA (<https://smart.kemenkeu.go.id/>).

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari IKPA dan EKA. Cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai IKPA}] + [50\% \times \text{Nilai EKA}]$$

Hasil nilai NKA, IKPA, dan EKA tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun 2023			Tahun 2024		
Nilai IKPA	Nilai EKA	NKA	Nilai IKPA	Nilai EKA	NKA
96,93	98,17	97,55	97,66	100	98,83

Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebesar 98,83 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,55. Nilai EKA mengalami kenaikan dari 98,17 pada tahun 2023 menjadi 100. Nilai IKPA mengalami kenaikan dari 96,93 di tahun 2023 menjadi 97,66 di tahun 2024. Terdapat dua komponen pada IKPA yang belum mencapai 100% yaitu Deviasi Halaman III DIPA sebesar 87,64% dan Penyerapan Anggaran sebesar 97,56%.

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah/target akhir renstra adalah sebagai berikut:

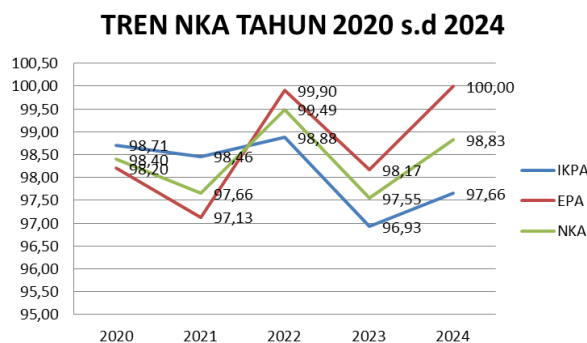
Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	%		
97,77	98,83	101,08	85	116,27

Dari tabel dapat dilihat Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebesar 98,83 lebih tinggi dari target sebesar 97,77. Persentase capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 101,08 %. Untuk persentase capaian realisasi terhadap target akhir tahun renstra 2024 sebesar 116,27%. Hal ini berarti pada tahun 2024 persentase capaian realisasi telah melebihi target akhir Renstra 2024.

Pencapaian NKA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	IKPA	EKA	NKA
2020	98,71	98,20	98,40
2021	98,46	97,13	97,66
2022	98,88	99,90	99,49
2023	96,93	98,17	97,55
2024	97,66	100,00	98,83

Tren NKA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut :



Program dan kegiatan yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- Pengajuan target kinerja dan pelaporan realisasi kinerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target pada aplikasi SAKTI.
- Pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan ketentuan.
- Penyampaian data kontrak dan pengajuan SPM kontraktual sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penyelesaian tagihan belanja (SPM) tepat waktu.
- Melakukan pengelolaan Uang Persediaan sesuai aspek ketepatan waktu dan % GUP (disebutkan).
- Melakukan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan perencanaan permohonan.
- Update halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan dan realisasi anggaran yang mengacu pada RPD Halaman III DIPA.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- Unsur Pimpinan memberikan kesempatan kepada pegawai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensinya.
- Pemetaan Sumber Daya Manusia BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dukungan dari *stakeholder* dalam keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran.



Rapat Internalisasi dan Refleksi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Proses revisi DIPA yang memerlukan waktu yang cukup lama dan berulang kali sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda;
- Proses buka blokir belanja modal oleh eselon 1 pada akhir Mei sehingga realisasi belanja modal terlambat;

- Adanya retur SPM GUP yang terjadi di akhir triwulan 3 yang disebabkan oleh kendala teknis di tingkat perbankan mengakibatkan realisasi anggaran yang seharusnya bisa dicapai pada triwulan 3 mundur menjadi triwulan 4;
- Adanya edaran Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 tentang efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Adanya pergeseran dan perubahan jadwal kegiatan yang mengakibatkan Deviasi Halaman III DIPA lebih dari 5% hampir di setiap bulannya.

Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan di atas, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan strategi berikut:

- Segera merevisi jadwal kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
- Segera memproses pengadaan belanja modal segera setelah proses buka blokir selesai;
- Berkoordinasi dengan KPPN Mataram dan memproses pengajuan retur SPM GUP sesuai ketentuan;
- Melaksanakan efisiensi sesuai edaran Menteri Keuangan dengan memilah kegiatan sesuai dengan urgensinya;
- Berusaha melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Jika ada kegiatan yang bergeser diupayakan ada kegiatan lain yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian nilai kinerja anggaran, langkah-langkah yang dapat dilakukan selain strategi untuk mengatasi hambatan atau permasalahan di atas antara lain:

- Memastikan output yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- Berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- Efisiensi anggaran.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Program prioritas nasional adalah program, kegiatan, atau proyek yang bertujuan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program ini juga bertujuan untuk mendukung kebijakan Presiden.

Pada pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam DIPA tahun 2024 telah dialokasikan untuk menunjang program prioritas yang merupakan kelanjutan dari program prioritas tahun sebelumnya. Kegiatan yang merupakan program prioritas adalah Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas.

Capaian Rincian Keluaran menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut:

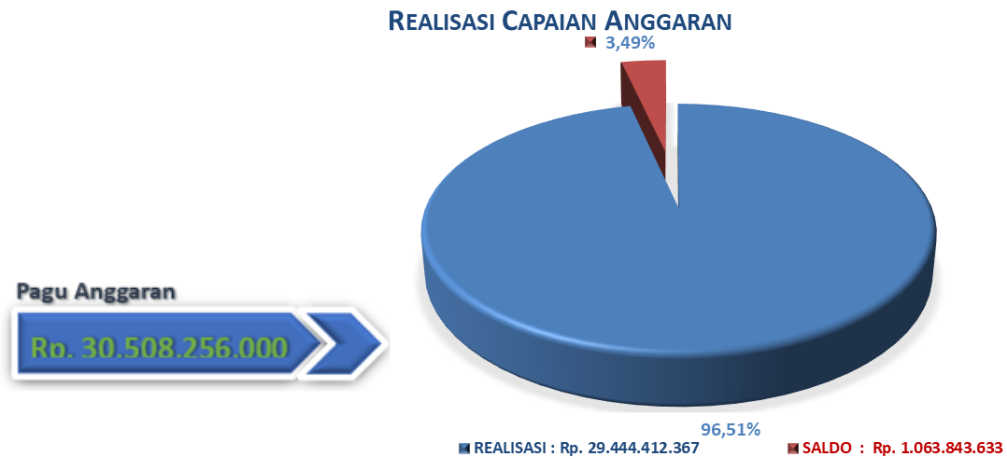
CAPAIAN RINCIAN KELUARAN SATKER BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024									
Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
	Kementerian/Lembaga : 023 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi								
	Unit Organisasi : 023.03 - Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah								
	Satuan Kerja : 419545 - BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat								
	Fungsi : 10 - Pendidikan								
	Sub Fungsi : 10.02 - Pendidikan Dasar dan Menengah								
	Program : DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								
	Lokasi : 23 - Nusa Tenggara Barat								
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	11.606.717.000	10.757.191.428	92,68%					
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11.606.717.000	10.757.191.428	92,68%					
750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	11.392.717.000	10.543.211.528	92,54%	4.797	4.797	Lembaga	100%	Adanya self blocking pemotongan anggaran biaya perjalanan dinas dan blokir AA yang menyebabkan sisa anggaran tidak dapat dimaksimalkan
850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	214.000.000	213.979.900	99,99%	5.154	5.154	Lembaga	100%	Semua kegiatan telah selesai dilaksanakan
WA	Program Dukungan Manajemen	18.901.539.000	16.459.023.571	87,08%					
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	18.901.539.000	16.459.023.571	87,08%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.952.939.000	14.524.156.071	85,67%					
956	Layanan BMN	10.000.000	10.000.000	100,00%	1	1	Dokumen	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
962	Layanan Umum	486.585.000	472.022.683	97,01%	1	1	Dokumen	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
994	Layanan Perkantoran	16.456.354.000	14.042.133.388	85,33%	1	1	Dokumen	100%	Untuk pembayaran belanja pegawai, gaji PPNPN dan operasional kantor
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.948.600.000	1.934.867.500	99,30%					
951	Layanan Sarana Internal	1.948.600.000	1.934.867.500	99,30%	1	1	Dokumen	100%	Pengadaan Layanan Sarana Intyernal telah selesai dilaksanakan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk program prioritas terdiri dari dua komponen, yaitu Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan kode 750 dan Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan kode 850. Realisasi dari kedua komponen tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase masing – masing adalah 100%.

C. Realisasi Anggaran

1. CAPAIAN ANGGARAN

Pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp. 30,508,256,000. Pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 29.444.412.367 dengan persentase daya serap sebesar 96,51%. Pagu anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami lima belas kali revisi, dari pagu awal Rp. 29.479.041.000. Pada revisi DIPA kedua belas mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 30,508,256,000. Namun pada posisi akhir anggaran masih terdapat pagu blokir sebesar 801.912.000, dengan 77.21% diantaranya atau sebesar 619.121.000 adalah belanja perjalanan dinas. Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Keuangan RI No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November Hal Langkah – Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024.



Pagu anggaran tersebut di atas digunakan untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan/Indikator	Anggaran	Realisasi	%
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	11.606.717.000	10.757.188.887	92,68
IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).			
SK 2. Meningkatnya Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	18.901.539.000	18.687.223.480	98,87
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.			



2. CAPAIAN ANGGARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 2,03% atau sebesar Rp. 619.121.000. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

- Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan meeting yang rencana awal menggunakan *fullboard* di luar kantor menjadi *fullboard* di dalam kantor
- Menggabungkan dua atau lebih kegiatan dalam satu kegiatan yang mempunyai sasaran peserta yang sama.
- Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring.

D. Kinerja Lain Lain

1. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Peraih Predikat ZI-WBK di penghujung tahun 2020 merupakan kristalisasi usaha BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

- Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi Informasi
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai proses administratif dan layanan pendidikan, seperti sistem e-learning dan digitalisasi data. Ini mempermudah akses informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan efisiensi birokrasi.
- Penataan Organisasi dan Tata Kelola yang Lebih Transparan
Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan juga menjadi bagian penting dari upaya ini.
- Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar, yang tidak hanya mengubah paradigma pendidikan tetapi juga berkontribusi pada reformasi birokrasi dengan memberikan otonomi lebih besar bagi satuan pendidikan dalam mengelola kurikulum. Ini mempermudah birokrasi dalam merespons kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.
- Kolaborasi dan Sinergi dengan *Stakeholder*
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi

ini memastikan bahwa program pendidikan yang dilaksanakan tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan di masyarakat.

- **Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Rekrutmen dan Promosi ASN**
Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang lebih berintegritas, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam proses seleksi dan promosi ASN. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai di posisi strategis memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
- **Peningkatan Layanan kepada Masyarakat**
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berfokus pada perbaikan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat, termasuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi pendidikan, serta memperbaiki sistem pengaduan dan feedback dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi.
- **Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)**
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat secara konsisten melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. Hal ini memastikan bahwa birokrasi dapat bekerja lebih efisien, responsif terhadap kebijakan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
- **Optimalisasi Aplikasi Kehadiran, Izin dan Cuti**
Untuk memudahkan layanan kepada internal, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan penggunaan aplikasi Asigo Kemendikbudristek dengan tujuan memudahkan proses pengajuan Kehadiran, Izin dan Cuti pegawai.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai satker yang telah meraih predikat ZI-WBK, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan pendampingan ke satker lain, baik di lingkungan Kemdikbudristek maupun di kementerian lainnya. Beberapa UPT Kemdikbudristek yang didampingi untuk mengikuti penilaian ZI-WBK pada tahun 2024 adalah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Bahasa Provinsi NTB.



Pendampingan ZI WBK oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan.



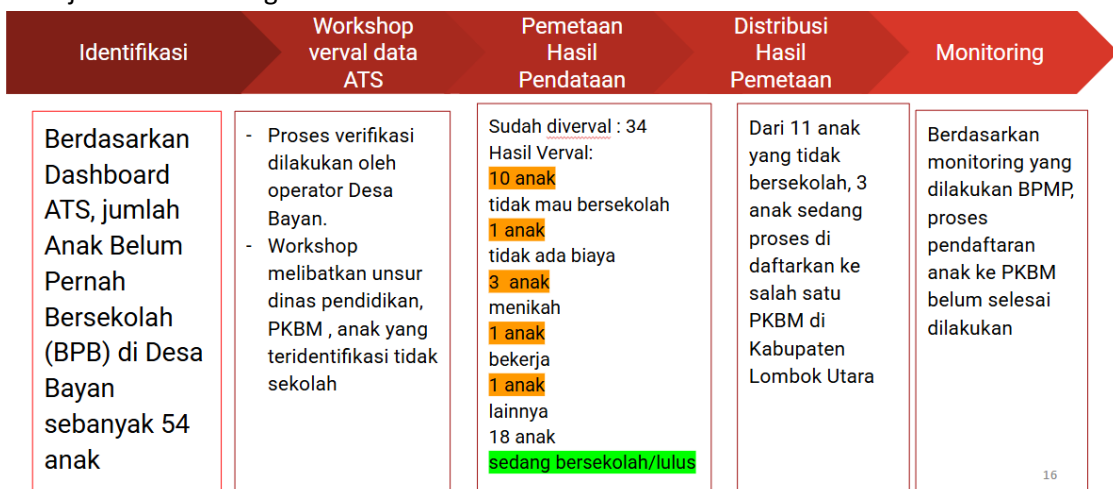
Pendampingan ZI WBK oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Bahasa Provinsi NTB

2. INFORMASI CAPAIAN KINERJA LAINNYA YANG MENDUKUNG

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

➤ Penuntasan Anak Tidak Sekolah di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Salah satu indikator prioritas SPM Pendidikan/Rapor Pendidikan Daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Capaian APS sangat dipengaruhi oleh jumlah anak tidak sekolah yang ada di daerah (ATS). Dalam rangka mengurangi ATS, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Desa Bayan serta satuan pendidikan yang ada di desa Bayan melakukan verifikasi data ATS. Siswa yang terjaring tidak sekolah dalam proses verifikasi diberikan pendampingan untuk masuk ke salah satu lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal yang ada di sekitar wilayah Bayan. Progres penuntasan ATS di desa Bayan ditunjukkan dalam bagan berikut:



Hasil verval ATS di Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Jumlah
1	Kec. Tanjung	95	275	370
2	Kec. Gangga	100	304	404
3	Kec. Bayan	303	738	1.041
4	Kec. Pemenang	49	243	292
5	Kec. Kayangan	154	479	633
	Jumlah	701	2.039	2.740

Sumber : <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>



3. INOVASI

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan inovasi :

➤ **Membangun Kolaborasi bersama Desa Literasi (Mbak Desi)**

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Masyarakat Desa Bayan. Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan literasi anak sekolah di desa bayan dan kurangnya aktivitas literasi di luar jam sekolah. Hampir semua pemangku kepentingan terlibat dalam program ini, diantaranya: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Kader Posyandu, Pegiat Literasi, Universitas Mataram, INOVASI, Kementerian Agama dan OPD terkait yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Tiga aspek penting dari program ini adalah kegiatan belajar di berugak literasi, pendampingan orang tua dan pembangunan eco-wisata literasi. Capaian akhir dari kolaborasi ini adalah meningkatnya minat baca masyarakat (anak dan orang tua) sertanya naiknya kompetensi literasi siswa.

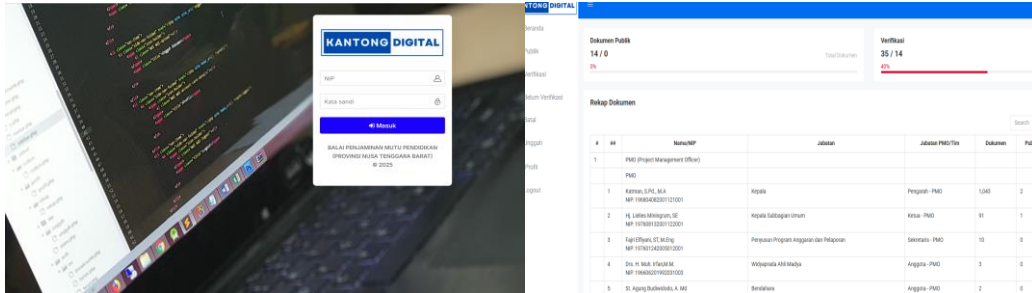
The infographic features the logos of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of BPMP NTB, and the slogan 'BERGERAK BERSAMA MELAKUKAKAN MERDEKA BELAJAR'. The main title is 'RUANG KOMUNIKASI MERDEKA BELAJAR (RUKO-MEBEL) BPMP PROVINSI NTB'. It contains three QR codes with corresponding text: 'Informasi Seputar Kebijakan Merdeka Belajar' (bit.ly/kmb-bmpntb), 'Media Pengumpulan Praktik Baik Sekolah se-NTB' (bit.ly/praktikbaik-bmpntb), and 'Media Saran dan Keluhan dari Sekolah' (bit.ly/saran-bmpntb). The bottom section includes various logos such as 'BerAKHLAK', 'bangga melayani bangsa', 'NORUPSI', 'NO Gratifikasi', 'MERDEKA BELAJAR', and social media icons for YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp (08113806669), and Telegram (t.me/ult_bmpntb). The website URL is https://bpmntb.kemdikbud.go.id.

Harapannya dengan adanya Ruko-mebel ini dapat merangkul sekolah-sekolah yang berada di pelosok dan jauh akan sumber daya sehingga langsung mendapat informasi dan berkomunikasi dengan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Pembagian Stiker Ruko-Mebel

▶ Kantong Digital (Kandi) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat



Merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengumpulkan bukti kinerja dari seluruh pegawai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aplikasi ini menggunakan sistem berjenjang yang dimana inputan dari pegawai langsung akan di verifikasi oleh atasannya. Harapannya dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pengontrolan kinerja dari masing-masing pegawai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

▶ Sistem Layanan Sertifikat Online (Silasol) BPMP Provinsi NTB



Merupakan layanan dari BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana diperuntukkan bagi peserta-peserta kegiatan yang dilaksanakan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aplikasi berbasis website ini dapat memudahkan peserta-peserta kegiatan untuk dapat langsung mengunduh sertifikat kegiatannya secara langsung dan kapan pun dimana saja. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan Kode-QR untuk memverifikasi keabsahan dari pemilik sertifikat tersebut.

Harapannya dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan para *stakeholder* yang berkegiatan dalam mendapatkan sertifikat hasil kegiatannya secara lebih fleksibel dan efisien.



Hasil sertifikat yang dilengkapi dengan Kode-QR

➤ Sistem Informasi Layanan Melalui Online (Silamo)



➤ Sistem Informasi Layanan Melalui Online Tanya Jawab (Silamo-Tajo)



Merupakan inovasi layanan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak perlu datang langsung secara luring tetapi layanan dapat dilaksanakan via daring. Pengunjung ULT dapat melakukan tanya jawab/ konsultasi melalui media online dengan memanfaatkan platform Zoom Meeting. Silamo-Tajo yang dilaksanakan setiap hari kerja pukul 10.00 sampai 12.00 WITA diharapkan dapat memudahkan layanan dari ULT BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga pengunjung dapat lebih flexibel untuk bertanya tentang berbagai macam informasi terkait kebijakan dan program-program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara langsung tanpa terbatas tempat dan waktu.

➤ **Sistem informasi Administrasi dan Manajemen Satuan Pendidikan (Si Adam Sadik)**



Merupakan aplikasi dashboard dengan memanfaatkan aplikasi google data studio yang berisikan informasi/data terkait capaian daerah baik Satuan Pendidikan maupun Dinas terkait program-program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah. Diharapkan dengan adanya dashboard ini dapat membantu mempermudah dinas, guru, dan stakeholder pendidikan lainnya untuk mendapatkan ringkasan data yang diperlukan terkait IKM, Fasilitator Sekolah Penggerak, Progres Login PMM, Rapor Pendidikan dan program prioritas lainnya.

4. PENGHARGAAN

Pada periode 2019 - 2024, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan penghargaan:

- **Admin Media Sosial terbaik pada Unit Layanan Terpadu (ULT) di UPT Daerah**
Penghargaan sebagai Admin Media Sosial Terbaik pada ULT di UPT Daerah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019.



➤ **Peringkat III dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

Penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Satuan Pengawas Intern (SPI) LPMP NTB pada tahun 2019 atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.



➤ **Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK)**

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 atas keberhasilan LPMP NTB meraih Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



► **Peringkat terbaik II pada kategori Unit Pelaksana Teknis**

Penghargaan diberikan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2023 dengan kategori Satuan Kerja UPT dengan raihan Skor Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99,49 dengan predikat Sangat Baik dalam mendukung peningkatan kualitas Pelaksana Anggaran di lingkungan Kemendikbudristek.



► **Penghargaan kategori Inisiatif Pengembangan SDM UPT Inspiratif**

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih anugerah “APRESIASI DUTA MERDEKA BELAJAR SEBAGAI UPT INSPIRATIF”, dengan Kategori Inisiatif Pengembangan SDM pada kegiatan Apresiasi Duta Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).



► Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota Bima

Piagam penghargaan yang diberikan kepada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pemda Kota Bima atas Dukungan Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bima pada kegiatan Anugerah Istimewa Pendidikan Kota Bima (MAHADIKA) Tahun 2024.



5. PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan program *crosscutting/collaborative*, melakukan kerja sama dan komitmen bersama BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan *stakeholder* pendidikan yang ada di NTB diantaranya.

➤ **BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Bapperida Kab. Lombok Tengah**

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dan berkomitmen dengan Bapperida Kab. Lombok Tengah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun lingkup kerjasama meliputi penyediaan sumber daya dalam rangka implementasi program prioritas Kabupaten Lombok Tengah. Program prioritas yang dimaksud antara penguatan karakter dan peningkatan kemampuan literasi siswa.



➤ **BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kolaborasi dengan Bunda Paud Provinsi NTB, Pokja PKK Provinsi NTB dan Dikbud Provinsi NTB melakukan sosialisasi Tiga Gerakan Transisi Paud ke SD yang menyenangkan di 10 Kab/Kota Provinsi NTB.**



Dalam rangka mensukseskan tiga gerakan Transisi Paud ke SD yang Menyenangkan di Provinsi NTB, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kolaborasi dengan Bunda Paud Provinsi NTB, Bunda Paud, Pokja PKK Kab/Kota serta Dikbud Kab/Kota se Provinsi NTB guna meminimalisir misskonsepsi yang terjadi terhadap tiga gerakan Transisi Paud ke SD yang menyenangkan dimana masih memaknai anak siap sekolah dari baca dan tulis semata sementara ada 6 kemampuan pondasi yang harus dimiliki anak sejak usia dini sesuai dengan fase perkembangan anak.

► Dokumentasi MoU atau PKS.

- a. Komitmen bersama Berkolaborasi Mewujudkan “Desa Bayan Bercahaya” Melalui Program Mbak Desi.



- b. Perjanjian Kerjasama antara Program Studi PPKn jurusan PIPS FKIP Universitas Mataram dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- c. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Penandatanganan Fakta Integritas mewujudkan PPDB yang transparan dan akuntabel dengan Pemda Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan 10 Kab/Kota Seprovinsi NTB, Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Kapolda Provinsi NTB, Kantor Bahasa Provinsi NTB, BGP Provinsi NTB, Ombudsman Provinsi NTB, PGRI Provinsi NTB, dan IGI Provinsi NTB.



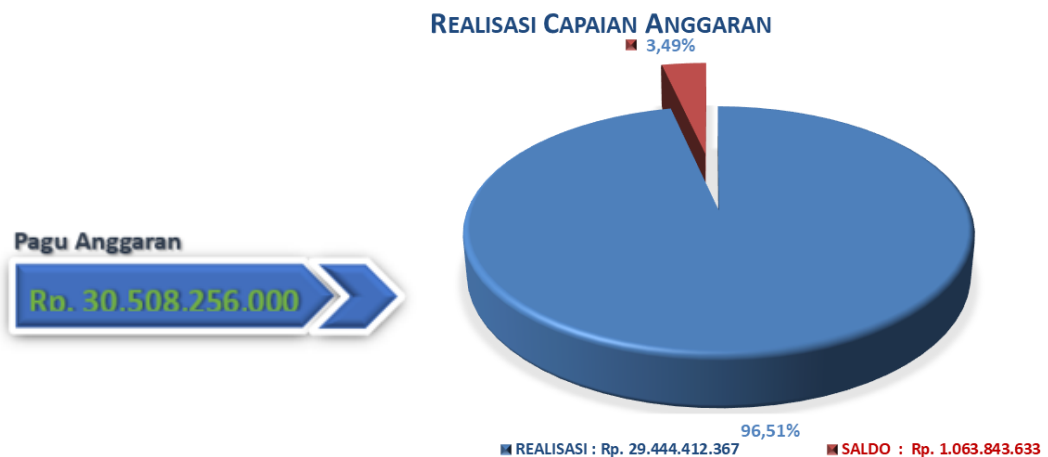
Dari beberapa program *crosscutting* yang dijelaskan, ada beberapa dampak yang dihasilkan, antara lain:

- a. Adanya intervensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk penyelesaian program prioritas;
- b. Efektifitas penggunaan sumber daya karena adanya kolaborasi penyediaan anggaran dan SDM; dan
- c. Adanya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bab IV Penutup

Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena dua sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sudah tercapai. Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen terdiri dari IKK 1.1 (persentase satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya) dan IKK 1.2 (persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)). Capaian IKK 1.1 sebesar 11,93 telah melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 3,92 dan capaian IKK 1.2 sebesar 100 telah melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 72,70. Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari IKK 2.1 (predikat SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan IKK 2.2 (nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat). Capaian IKK 2.1 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK predikat A dan capaian IKK 2.2 sebesar 98,33 telah melampaui dari target yang ditetapkan dalam PK sebesar 97,77.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh kinerja keuangan tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 29.444.412.367 atau 96,51% dari total pagu anggaran sebesar 30.508.256.000. Capaian daya serap anggaran tahun 2024 berkontribusi terhadap capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1 Kurang optimalnya Tim PMO daerah di Kabupaten/Kota disebabkan penganggaran yang belum fokus pada dukungan pelaksanaan PSP, kurangnya inisiatif dalam melaksanakan program PMO, rendahnya tingkat kepedulian dari unsur pejabat dan sering terjadinya penggantian pejabat;
- 2 Masih rendahnya aktivitas belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) disebabkan beberapa guru dan kepala sekolah lupa akun belajar.id, dan kemampuan IT yang masih rendah;
- 3 Banyak Satuan Pendidikan yang belum menggunakan SIPLAH untuk pengadaan barang atau jasa;
- 4 Tidak semua kepala sekolah dan guru memahami fungsi dan manfaat platform pembelajaran (GWE) termasuk untuk Peserta Didik;
- 5 Kurang Optimalnya Pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran di Satuan Pendidikan;
- 6 Masih ada Satuan Pendidikan yang belum melakukan analisis Rapor Pendidikan, memahami mekanisme Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 7 Tidak ada regulasi terkait persentase minimal sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan masih adanya perbedaan pemahaman di pemda terkait regulasi SPM;
- 8 Terdapat perbedaan persepsi Pemda terkait pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah (KSPS);
- 9 Pemda provinsi belum memiliki satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP);
- 10 Pemahaman terkait kebijakan Asesmen Nasional belum dipahami oleh seluruh Satuan Pendidikan, khususnya Satuan Pendidikan swasta;
- 11 Terdapat Peserta Didik aktif yang terdata sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 12 Belum optimalnya implementasi kebijakan transisi PAUD SD yang menyenangkan di Satuan Pendidikan;
- 13 Program pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi belum diterapkan di semua Satuan Pendidikan;
- 14 Program Gerakan Sekolah Sehat (GSS) belum menjangkau semua Satuan Pendidikan;
- 15 Pelayanan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kabupaten/kota belum maksimal; dan
- 16 Tata kelola dapodik di beberapa Satuan Pendidikan terkait kelengkapan, validitas dan kemutakhiran data belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan upaya perbaikan antara lain:

- 1 Sosialisasi program dan kebijakan merdeka belajar;
- 2 Melakukan Advokasi Dalam Memperkuat Kerjasama Bersama Pemangku Kepentingan;
- 3 Membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar;
- 4 Berkoordinasi secara intensif dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar;
- 5 Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target kinerja;
- 6 Melakukan refleksi secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan;
- 7 Menjadikan inovasi sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja; dan
- 8 Diseminasi dan berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar.

Tercapainya sasaran kegiatan sangat didukung oleh inovasi yang telah diterapkan oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain:

- 1 Membangun Kolaborasi bersama Desa Literasi (Mbak Desi);
- 2 Ruang Komunikasi Merdeka Belajar (Ruko-Mebel);
- 3 Kantong Digital (Kandi) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4 Sistem Layanan Sertifikat Online (Silasol) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5 Sistem Informasi Layanan Melalui Online (Silamo);
- 6 Sistem Informasi Layanan Melalui Online Tanya Jawab (Silamo-Tajo); dan
- 7 Sistem informasi Administrasi dan Manajemen Satuan Pendidikan (Si Adam Sadik).

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan optimal sebelum memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kegiatan dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan. Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk periode berikutnya:

- 1 Penguatan Pendidikan Karakter : penanaman karakter melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia;
- 2 Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan;

- 3 Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi Guru ;
- 4 Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi;
- 5 Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
- 6 Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Lampiran Lampiran





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Katman

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Mataram, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Iwan Syahril
NIP 197610262023211002

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Katman
NIP 196804082001121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	72.70
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.77

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 17.768.006.000,-
2.	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 11.711.035.000,-
Total Anggaran			Rp. 29.479.041.000,-

Mataram, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Katman

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Iwan Syahril


Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Mataram, 29 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah
Iwan Syahril

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Katman



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	72.70
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nilai	97.77

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 18.901.539.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 11.606.717.000
Total Anggaran			Rp 30.508.256.000

Mataram, 29 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
 Dasar dan Pendidikan Menengah
 Iwan Syahril


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Penjaminan Mutu
 Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara
 Barat
 Katman



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Laporan Kinerja Triwulan 1 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	72.70	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.77	Nilai	0	0



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Capaian IKK Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya belum dapat dihitung pada triwulan 1. IKK ini didukung oleh RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKK ini adalah Pelaksanaan Transisi PAUD - SD berupa kegiatan:

- Sosialisasi dan Pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivikasi Forkom PAUD - SD yang diselenggarakan pada bulan Januari 2024 secara daring menggunakan media zoom meeting, dengan jumlah partisipan sebanyak 63 orang yang merupakan pejabat dan pengawas Dinas Pendidikan dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.
- Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD yang diselenggarakan pada bulan Maret 2024 secara daring menggunakan media zoom meeting, dengan jumlah partisipan sebanyak 150 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, Kemenag kabupaten dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, Pengawas, Kepala Sekolah PAUD/RA , Kepala Sekolah SD/MI, Guru PAUD/RA dan Guru SD/MI kelas rendah.

Kendala / Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak semua wilayah kabupaten/kota memiliki jaringan internet yang baik, sedangkan sebagian besar kegiatan Transisi PAUD SD yang menyenangkan menggunakan metode daring dengan media zoom meeting. Akibatnya belum semua satuan PAUD/RA dan SD/MI menerima informasi 3 (tiga) target perubahan Transisi PAUD SD yang menyenangkan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu melakukan advokasi dan pendampingan ke seluruh kabupaten/kota melalui metode luring dengan turun langsung ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kemenag, sehingga dengan demikian informasi mengenai Transisi PAUD SD yang menyenangkan dapat lebih luas menjangkau satuan PAUD/RA dan SD/MI yang belum memperoleh informasi tersebut.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. [SK 1.0 Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) belum dapat dihitung capaiannya pada Triwulan 1. IKK ini didukung oleh RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya. Untuk mendukung IKK ini, kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka berupa kegiatan Visitasi IKM, Melaksanakan persiapan festival Kurikulum Merdeka (Pameran berbagai hasil karya seperti foto, festival budaya, parade, talkshow dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM) pada bulan Februari 2024 yang diselenggarakan secara luring, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
- Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak berupa Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan, yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dengan metode luring, dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang. Pemantauan dan percepatan tingkat transportasi satpem, Pemetaan Sekolah Pelaksanaan PSP dan sekolah imbas yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan metode luring yaitu dengan turun ke Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima dan Provinsi.
- Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data berupa Pelaksanaan kegiatan advokasi aktivitas komunitas belajar dalam rangka transformasi satuan pendidikan oleh UPT yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan metode luring, dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang. Pendampingan perencanaan Pemda terkait SPM pendidikan oleh UPT yang diselenggarakan pada bulan Maret 2024 dengan metode luring yaitu dengan turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan berupa Sharing session pelaksanaan mentoring SDM UPT. Koordinasi program kualitas pengajaran dan pembelajaran TA. 2024, Capacity Building antar UPT Satker. Kegiatan penjarangan informasi komunitas belajar dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dengan cara turun ke Kabupaten/Kota. Kegiatan FGD tindak lanjut kebijakan program guru penggerak dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan metode luring yaitu dengan turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah berupa kegiatan Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BSOP melalui Arkas Tahun 2023 dengan cara turun ke Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelatihan/bimtek ARKAS/MARKAS pada pemerintah daerah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 menggunakan metode luring, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pelaksanaan pelatihan/bimtek SIPlah pada pemerintah daerah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 menggunakan metode luring, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Advokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2024. Pada bulan Februari 2024 Advokasi dilakukan dengan mengundang peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan pada bulan Maret 2024 kegiatan Advokasi dilakukan dengan turun ke Kabupaten/Kota.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi berupa kegiatan Menyusun strategi komunikasi kegiatan/event yang diselenggarakan pada bulan Februari 2024 dengan peserta dari internal BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I pada bulan Februari 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT. Penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT (Penguatan literasi melalui ENIKKI) yang dilaksanakan secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang yang merupakan guru, murid kelas rendah, komunitas literasi dari kabupaten Lombok Utara.
- Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat berupa kegiatan Semarak GSS yang dilaksanakan secara luring pada bulan Februari 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang.
- Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus berupa kegiatan Advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusif kepada pemerintah daerah yang diselenggarakan pada bulan Maret 2024.

Kendala / Permasalahan :

Pada Pelaksanaan pembinaan perencanaan berbasis data khususnya pada kegiatan pendampingan perencanaan pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT terdapat kendala/permasalahan yang terjadi antara lain:

- Pengalokasian sub kegiatan SPM belum optimal dilakukan karena adanya program prioritas kepala daerah yang tidak sinkron dengan pemenuhan SPM,
- Adanya mutasi pejabat dan pejabat baru tidak begitu memahami SPM dan rapor pendidikan,
- Pemenuhan indikator APS khususnya kesetaraan sulit dilakukan karena dinas kesulitan mendapatkan data siswa yang putus sekolah.

Strategi / Tindak Lanjut :

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan pembinaan perencanaan berbasis data khususnya pada kegiatan pendampingan perencanaan pemda terkait SPM pendidikan oleh UPT, strategi yang dilakukan yaitu:

- Perlu adanya advokasi sampai ke tingkat kepala daerah sebagai penanggung jawab tim penerapan SPM daerah tentang pentingnya pemenuhan SPM,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- Berkomunikasi dengan PMO yang ada di dinas sehingga ketika terjadi mutasi pejabat ada mekanisme untuk mendesiminasi pemahaman terkait rapor pendidikan/SPM,
- Dinas perlu difasilitasi/didampingi untuk mendapatkan data siswa yang putus sekolah.

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress / Kegiatan :

Penilaian SAKIP baru dilaksanakan pada triwulan 4, sehingga predikatnya belum dapat diketahui pada triwulan 1. IKK Predikat SAKIP didukung oleh RO layanan umum pada komponen perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan ZI WBK/WBBM. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IKK ini antara lain:

- Menyampaikan Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 tepat waktu sebelum tanggal 31 Januari 2024,
- Koordinasi Pelaksanaan Reviu Renstra dan Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada SPASIKITA secara daring melalui media webinar pada bulan Januari 2024,
- Reviu Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024,
- Menyusun Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024,
- Sosialisasi Modul Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 pada aplikasi SPASIKITA secara daring pada bulan Maret 2024,
- Tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2023 pada bulan Maret 2024.

Kendala / Permasalahan :

Kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu terhambatnya proses penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 karena untuk dapat menyusun Perjanjian Kinerja harus menyelesaikan Reviu Renstra terlebih dahulu. Selain itu aplikasi SPASIKITA sementara waktu tidak dapat diakses dikarenakan sedang proses finasilsasi migrasi data antarsistem.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu:

- Segera melaksanakan rapat Reviu Renstra tahun 2024 agar dapat melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024,
- Selalu memantau aplikasi SPASIKITA agar dapat segera menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024 saat aplikasi SPASIKITA sudah dapat diakses.

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan 1 capaian Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L masih fluktuatif. IKK ini didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, workshop penatausahaan keuangan dan RO Layanan Perkantoran. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran adalah:

- Pengajuan target kinerja dan pelaporan realisasi kinerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target pada aplikasi SAKTI,
- Penyelesaian tagihan belanja (SPM) tepat waktu,
- Pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan ketentuan,
- Melakukan pengelolaan Uang Persediaan sesuai aspek ketepatan waktu dan persen GUP (disebulankan),
- Update halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan dan realisasi anggaran yang mengacu pada RPD halaman III DIPA.

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang terjadi pada triwulan 1 adalah:



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Proses revisi DIPA membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran,
- Terjadi perubahan kegiatan dan capaian output pada masing-masing PDM yang menyebabkan perubahan pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran,
- Anggaran belanja modal masih di blokir sehingga proses untuk pengadaan belanja modal belum dapat dilakukan dan hal ini berpengaruh terhadap perolehan nilai IKPA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu:

- Segera melaksanakan pembayaran tagihan belanja saat revisi DIPA telah selesai, sehingga anggaran dapat segera terserap,
- Menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perubahan yang terjadi dan segera melaksanakan kegiatan tersebut,
- Mulai merencanakan proses pengadaan belanja modal, sehingga saat sudah dilakukan buka blokir proses pengadaan dapat langsung berjalan.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419545.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	4.797	349	4.448	11.497.035.000	1.741.614.487	9.755.420.513
[419545.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5.154	0	5.154	214.000.000	0	214.000.000
[419545.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	130.754.288	344.245.712
[419545.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	15.793.006.000	3.961.850.617	11.831.155.383
[419545.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	1.500.000.000	0	1.500.000.000
Total					29.479.041.000	5.834.219.392	23.644.821.608



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



D. Rekomendasi Pimpinan

1. Untuk memastikan semua target tercapai optimal lini masa kegiatan agar dipertajam,
2. Dilakukan monitoring dan refleksi secara reguler untuk memastikan proses berjalan dengan baik.

Mataram, 20 Mei 2024

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Katman
NIP 196804082001121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Triwulan 2 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembeajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	72.70	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.77	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya belum dapat dihitung capaiannya di Triwulan 2. IKK ini didukung oleh RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKK ini adalah Pelaksanaan Transisi PAUD – SD berupa kegiatan:

- Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan yang diselenggarakan pada bulan Juni 2024 dengan menggunakan metode daring menggunakan zoom meeting
- Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran transisi PAUD kepada Dinas Pendidikan dengan menggunakan metode luring turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota pada bulan Mei 2024. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dengan mengundang peserta sebanyak 20 orang berasal dari Pengawas SD, Kepala SD, Guru SD kelas 1 dan 2
- Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran transisi PAUD kepada Kanwil Kemenag yang diselenggarakan pada bulan Mei 2024 dengan metode luring turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kabupaten/Kota dengan menggunakan 10 orang peserta di setiap Kabupaten/Kota.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Banyaknya revisi DIPA di tingkat pusat yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
- Di tahun 2024 kegiatan melibatkan stakeholder diluar Kemendikbudristek yaitu perwakilan Kemenag Kabupaten/Kota. Karena belum pernah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya, kegiatan dilaksanakan di dinas pendidikan kab/kota bukan di kemenag kab/kota.

Strategis/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu:

- Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan sesuai dengan hasil revisi di tingkat pusat
- Meningkatkan dan memperluas komunikasi dengan stakeholder diluar Kemendikbud sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama.

2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

Capaian presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) belum dapat dihitung pada Triwulan 2. IKK ini didukung oleh RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya. Untuk mendukung IKK ini, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka, berupa kegiatan:

- Visitasi IKM yang diselenggarakan pada bulan Mei – Juni 2024 berupa kunjungan ke satuan pendidikan
 - Refleksi IKM Tahap I yang diselenggarakan pada bulan Juni 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB dengan mengundang 50 orang peserta yang merupakan penanggungjawab IKM PAUD, Dikdas dan Dikmen.
2. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional, berupa kegiatan:
 - Workshop kebijakan ujian kesetaraan UK Regional I dan II yang diselenggarakan di BPMP Provinsi NTB pada bulan April 2024
 - Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan metode luring, turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota
 - Penyusunan laporan hasil workshop pada bulan Juni 2024.
 3. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah berupa kegiatan:
 - Advokasi Pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan metode luring, turun ke Kabupaten Bima
 - Koordinasi peningkatan pencapaian target wajar 12 tahun + 1 tahun yang diselenggarakan di BPMP Provinsi NTB pada bulan Juni 2024 dengan peserta sebanyak 41 orang.
 4. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak, berupa kegiatan:
 - Pemetaan sekolah pelaksana PSP melalui penandatanganan komitmen sekolah imbas yang dilaksanakan secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 168 orang dari Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima dan Dinas Provinsi
 - Pameran dalam rangka menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar untuk memperingati Hardiknas tahun 2024 yang merupakan kegiatan kolaborasi 3 (tiga) UPT Kemendikbudristek di Provinsi NTB yaitu BPMP Provinsi NTB, BGP Provinsi NTB dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, diselenggarakan pada bulan Mei 2024
 - Pemetaan sekolah imbas PSP yang diselenggarakan pada bulan Mei 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 168 orang bertempat di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima
 - Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan I melalui workshop berbagi praktik baik untuk penguatan Komunitas Belajar yang diselenggarakan pada bulan Juni 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang yang merupakan PSP Angkatan I dan PMO Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima dan Provinsi
 - Koordinasi percepatan transformasi satuan pendidikan pelaksana PSP dengan PMO daerah melalui penyegaran intervensi yang diterima oleh PSP oleh UPT untuk Pemda pelaksana PSP. Kegiatan ini dilaksanakan di BPMP Provinsi NTB pada bulan Juni 2024 dengan peserta sebanyak 52 orang berasal dari dinas 10 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 5. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data, berupa kegiatan Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 secara luring. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota, dengan mengundang 85 orang peserta per kabupaten/kota.
 6. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan, berupa kegiatan:
 - Penjaringan komunitas belajar pemerintah daerah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB. Peserta berasal dari wali wilayah dan admin dashboard, PIC, PMO 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan provinsi
 - Analisis permasalahan PPDB (*Need Assessment*) yang dilaksanakan pada bulan April 2024 dengan metode luring, turun ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota
 - Pendampingan PPDB Daerah ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang dilaksanakan pada bulan April 2024

- Pemantauan pelaksanaan PPDB jenjang SD, SMP dan SMA yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan metode luring, turun ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota
 - FGD persiapan Bimtek penguatan PPKSP dengan metode luring ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota, mengumpulkan Kabid, Koordinator pengawas dan operator PPKSP. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
7. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah, berupa kegiatan:
 - Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam pembelajaran memanfaatkan TIK) series 1 pada bulan April 2024 dengan metode daring
 - Sosialisasi dan koordinasi kualitas dapodik dengan Pemda yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang yang merupakan pejabat dan operator dinas kabupaten/kota
 - Advokasi pemerintah daerah untuk transformasi digital dalam pembelajaran (DB) pada bulan Juni 2024 dengan metode luring turun ke 10 kabupaten/kota.
 8. Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi berupa paket pemeliharaan dan pengembangan laman UPT dengan menggunakan pihak ketiga dimana penarikan dananya dilakukan pada bulan Juni 2024.
 9. Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran, berupa kegiatan:
 - Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap III oleh UPT pada bulan Mei 2024 dengan berkunjung ke 30 sekolah di pulau Lombok
 - Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT yang diselenggarakan pada bulan Juni 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang berasal dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan peserta internal
 - Lokakarya menceritakan kembali dan cuci tangan pakai sabun bersama Oase KIM pada bulan Juni 2024. BPMP Provinsi NTB bertugas untuk memfasilitasi penyediaan tempat pelaksanaan kegiatan.
 10. Pelaksanaan Sekolah Sehat, berupa kegiatan:
 - Sosialisasi dan Advokasi penguatan KSS dari UPT ke pengawas dan TP UKS Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan pada bulan April 2024 dengan peserta berjumlah 40 orang
 - Pendampingan ke sekolah satuan binaan (Satpen binaan 2023 dan 2024) dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan metode luring, turun ke 10 kabupaten/kota.
 11. Pelaksanaan Transformasi Pendidikan, berupa kegiatan:
 - Persiapan sosialisasi dan advokasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di daerah serta sosialisasi kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di daerah pada bulan April 2024 dengan metode luring mengundang peserta sebanyak 48 orang
 - Silamo pemanfaatan PMM untuk pelatihan mandiri topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 secara daring. Sasaran peserta adalah 438 satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang belum akses.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Untuk meningkatkan pemahaman *stakeholder* daerah terhadap urgensi kebijakan ujian kesetaraan (UK) dilakukan pembekalan dan penyamaan persepsi peserta calon narasumber melalui berbagai workshop seperti workshop kebijakan UK, penyusunan laporan hasil workshop namun baru 5 kabupaten yang melaksanakan tindak lanjut workshop tersebut di daerahnya masing-masing

- Banyaknya revisi DIPA di tingkat pusat yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

Strategis/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu:

- Terus mendorong peserta yang telah mengikuti workshop untuk melakukan tindak lanjut salah satunya dengan melakukan sosialisasi melalui wa group
- Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan sesuai dengan hasil revisi di tingkat pusat.

3. [SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Predikat SAKIP belum dapat diketahui di triwulan 2 karena penilaian SAKIP baru dilaksanakan pada triwulan 4. IKK Predikat SAKIP didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan ZI WBK/WBBM. Kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain:

- Penguatan dan Berbagi Praktek Baik Pembangunan ZI WBK/WBBM BPMP Provinsi NTB kepada seluruh pegawai BPMP Provinsi NTB yang diselenggarakan pada bulan April 2024
- Penyusunan rencana kerja dan pemenuhan dokumen Pembangunan ZI WBK/WBBM BPMP Provinsi NTB pada bulan April 2024
- Sosialisasi penyusunan rencana aksi tahun 2024 melalui webinar pada bulan April 2024
- Penyusunan rencana aksi BPMP Provinsi NTB tahun 2024
- Sosialisasi pengukuran kinerja tahun 2024 melalui zoom meeting pada bulan Mei 2024
- Penyusunan laporan pengukuran kinerja BPMP Provinsi NTB triwulan 1 tahun 2024
- Rapat evaluasi dan percepatan capaian kinerja BPMP Provinsi NTB semester 1 tahun 2024 pada bulan Juni 2024.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi internal satker untuk pengumpulan data kinerja, sehingga informasi tentang kegiatan yang telah terlaksana di masing-masing PDM masih kurang.

Strategis/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan adalah perlu adanya perwakilan dari tiap PDM yang bertugas untuk menginput progress pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi internal satker.

4. [SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L di triwulan 2 masih fluktuatif. IKK ini didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, workshop penatausahaan keuangan dan RO Layanan Perkantoran. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran yaitu:

- Penyelesaian tagihan belanja (SPM) tepat waktu
- Pelaporan realisasi kinerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target pada aplikasi SAKTI
- Pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan ketentuan
- Melakukan pengelolaan uang persediaan sesuai aspek ketepatan waktu dan persen GUP (disebutkan)
- Update halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan dan realisasi anggaran yang mengacu pada RPD halaman III DIPA

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang terjadi antara lain:

- Ada kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan karena pelaksanaan kegiatan di akhir bulan
- Terjadi perubahan jadwal pada beberapa kegiatan dikarenakan adanya revisi anggaran oleh Eselon 1

Strategis/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- Segera mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah terlaksana pada bulan selanjutnya agar dapat meningkatkan penyerapan anggaran
- Melakukan penyesuaian jadwal pada kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419545.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	4.797	3.719	1.078	11.497.035.000	4.190.012.420	7.307.022.580
[419545.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5.154	5.154	0	214.000.000	172.181.800	41.818.200
[419545.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	201.305.068	273.694.932
[419545.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	15.793.006,000	8.579.984.355	7.213.021.645
[419545.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	1.500.000.000	498.885.000	1.001.115.000

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar timeline rencana realisasi sampai Desember segera disesuaikan dengan capaian Triwulan 2
2. Dilakukan pemantauan secara periodik

Mataram, 7 Agustus 2024

Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat



Katman

NIP 196804082001121001



Laporan Kinerja Triwulan 3 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	72.70	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.77	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

Capaian IKK Presentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya belum dapat dihitung pada triwulan III. IKK ini didukung oleh RO Satuan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKK ini adalah Pelaksanaan Transisi PAUD - SD berupa kegiatan:

1. Nonton bareng video inspirasi perubahan pembelajaran gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan media zoom meeting yang diikuti oleh 155 peserta;
2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD - SD kepada satuan pendidikan pada bulan Juli 2024 yang dilaksanakan dengan cara turun ke satuan pendidikan jenjang PAUD dan SD kelas rendah;
3. Supervisi pelaksanaan RTL Pokja Bunda PAUD yang dilaksanakan pada bulan September 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

dengan cara turun ke Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota. Supervisi dilakukan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya implementasi tiga target perubahan Transisi PAUD-SD yang menyenangkan melalui Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Desa, dan miskonsepsi di masyarakat terkait kesiapan anak sekolah;
2. Masih ada miskonsepsi terhadap masa MPLS dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama dua minggu.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Membangun kerjasama dengan Pokja Bunda PAUD dan memberikan pemahaman wali siswa/masyarakat melalui kegiatan Pokja Bunda PAUD dan PKK;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda tentang penguatan MPLS.

[SK 1] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) belum dapat dihitung capaiannya di triwulan III. IKK ini didukung oleh RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya. Untuk mendukung IKK ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka, berupa kegiatan:
 - a. Melakukan advokasi pemanfaatan perangkat ajar di PMM bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan pelaksana IKM pada bulan Juli 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 63 orang;
 - b. Menggalang mitra pembangunan IKM yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 secara luring dengan mengundang 45 orang peserta;
 - c. Penilaian karya potret cerita Festival Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2024;
 - d. Melaksanakan Festival Kurikulum Merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festival budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif (IKM) pada bulan Agustus 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB;
 - e. Pemberian penghargaan penyelenggaraan Festival Kurikulum Merdeka pada bulan Agustus 2024;
 - f. Melakukan advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM pada bulan Agustus 2024.
2. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional, berupa kegiatan:
 - a. Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMA yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan turun ke satuan pendidikan jenjang SMA di 11 Kab/Kota;
 - b. Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar Tahun 2024 jenjang SMP yang dilaksanakan pada bulan September 2024 dengan turun ke satuan pendidikan jenjang SMP di 11 Kab/Kota.
3. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah, berupa kegiatan Rapat koordinasi peningkatan capaian target Wajar 12 tahun dan PAUD yang diselenggarakan pada bulan Juli 2024, dengan mengundang 50 orang peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan dan KCD se- Provinsi NTB.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak, berupa kegiatan:
 - a. Koordinasi PMO dengan Pemda yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan mengundang 70 orang peserta;
 - b. Pelaksanaan forum pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada bulan September 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB dengan jumlah peserta sebanyak 86 peserta;
 - c. Koordinasi komunitas belajar antar UPT yang dilaksanakan pada bulan September 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB dengan mengundang 140 orang peserta.
5. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data, berupa kegiatan:
 - a. Advokasi dan pendampingan pemanfaatan Rapor Pendidikan kepada Pemerintah Daerah pada bulan Juli 2024 secara daring melalui media zoom meeting. Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 250 orang;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi PBD Satpen oleh UPT di wilayah Kab/Kota pada bulan September 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota.
6. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan, berupa kegiatan:
 - a. Rapat koordinasi transformasi pendidikan provinsi NTB Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 85 orang;
 - b. Pemantauan pelaksanaan PPDB jenjang SD, SMP dan SMA yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota;
 - c. Kemitraan UPT dengan daerah pada bulan Juli 2024 yang dilaksanakan di Kab/Kota se-Provinsi NTB;
 - d. Pelatihan monitoring untuk Kepala BBPMP/BPMP dan Karyawan BPMP NTB. Pelatihan monitoring untuk Kepala BBPMP/BPMP dilaksanakan di Pusat pada bulan Agustus 2024, sedangkan pelatihan mentoring untuk karyawan BPMP NTB dalam bentuk Kelompok Belajar (Kombel);
 - e. Rapat koordinasi UPT terkait pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas sekolah pada bulan Agustus 2024 yang diikuti oleh 15 orang peserta;
 - f. Bimtek PPKSP pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang;
 - g. Refleksi dan penyusunan rekomendasi pelaksanaan PPDB pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 50 peserta;
 - h. FGD persiapan Bimtek penguatan PPKSP yang diikuti oleh 32 peserta pada bulan Agustus 2024;
 - i. FGD tindak lanjut hasil pendampingan komunitas belajar pada bulan September dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.
7. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah, berupa kegiatan:
 - a. Bimtek satuan pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS-SIPLah yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 bertempat di BPMP Provinsi NTB dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang;
 - b. Advokasi pemerintah daerah untuk transformasi digital dalam pembelajaran pada bulan Juli 2024 dengan turun ke 11 Kab/Kota;
 - c. Uji petik audit bantuan peralatan TIK tahun 2020 bersama BPKP Pusat pada Kabupaten Sumbawa di bulan Juli 2024;
 - d. Advokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap I TA. 2024 pada bulan Agustus 2024 dengan turun ke Kab/Kota;
 - e. Sosialisasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait program SIAR pada bulan Agustus 2024 yang diikuti oleh 46 orang peserta;
 - f. Rapat koordinasi Pendamping Pemanfaatan TIK (PemanTIK) pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 19 orang;
 - g. Uji petik anomali data yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota.
8. Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi, berupa kegiatan:
 - a. Penyusunan alur cerita/substansi konten program prioritas yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 yang diikuti 40 orang peserta;
 - b. Produksi konten program prioritas yang dilaksanakan di Pulau Lombok pada bulan Agustus 2024;
 - c. Kumpul komunitas dan KOL Lokal dalam rangka komunikasi program prioritas Ditjen PDM pada bulan Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang peserta;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- d. Penyusunan pilar konten, rencana konten dan manajemen media sosial UPT berdasar pilar konten unit utama pada bulan September 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang;
 - e. Media visit dalam rangka kampanye program prioritas ke media lokal pada bulan September 2024. Media yang dikunjungi adalah TVRI NTB beralamat di Jalan Majapahit no. 15 Mataram.
9. Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran, berupa kegiatan:
- a. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT dan Sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah pada bulan Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 49 orang;
 - b. Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT pada bulan Juli 2024 yang diikuti 37 peserta;
 - c. Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap II pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang;
 - d. Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi pada bulan Agustus di Pulau Sumbawa;
 - e. Pelepasan mahasiswa program kampus merdeka angkatan 8 pada bulan September 2024 yang diikuti oleh 88 orang peserta.
10. Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat, berupa kegiatan:
- a. Pendampingan ke Satuan Pendidikan Binaan (Satpen Binaan 2023 dan 2024) pada bulan Juli 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota;
 - b. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan TKSI ke satuan pendidikan pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang;
 - c. Pendampingan pelaksanaan TKSI pada bulan Agustus 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota.
11. Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus berupa kegiatan Pelaksanaan advokasi pemanfaatan pendidikan berjenjang pendidikan inklusif di satuan pendidikan pada bulan Juli 2024 dengan cara turun ke 11 Kab/Kota.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya kendala dalam menggalang mitra pembangunan IKM dimana beberapa mitra belum memprogramkan pada peningkatan mutu/kompetensi pendidik;
2. Hasil karya yang dikirimkan pada Festival Kurikulum Merdeka belum maksimal dan belum berasal dari lintas jenjang, kategori maupun kewilayahan yang diharapkan;
3. Pada pelaksanaan GSS masih ada beberapa sekolah tidak mengirimkan video Gala Kreasi GSS dan belum mengisi asesmen TKSI;
4. Adanya anomali data Dapodik akibat dari berbedanya data yang diinput di Dapodik dengan data di lapangan;
5. Masih rendahnya jumlah pendidik yang melakukan pemanfaatan PMM topik pendidikan berjenjang pendidikan inklusif (dasar).

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu:

1. Melakukan advokasi IKM pada mitra dan pendampingan pada komunitas belajar;
2. Melakukan sosialisasi serta menyebarluaskan informasi pelaksanaan Festival Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Dinas Pendidikan terkait. Selain itu perlu adanya coaching clinic sebagai persiapan dari kegiatan tersebut;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengawas untuk membantu sekolah mengirim video GSS dan melakukan asesmen TKSI baik untuk Sekolah Binaan ataupun Non Sekolah Binaan;
4. Melakukan uji petik ke semua Kabupaten/Kota dengan menambahkan satuan pendidikan sasaran sehingga capaian IKD Provinsi NTB dapat dilihat secara utuh;
5. Melaksanakan pendampingan ke gugus dan satuan pendidikan melalui aktivitas SULING (Sajian Unit Layanan Keliling).



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III Predikat SAKIP belum dapat diketahui karena hasil penilaiannya disampaikan di Triwulan IV. IKK Predikat SAKIP didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan ZI WKB/WBBM. Kegiatan yang mendukung capaian IKK antara lain:

1. Rapat tim SAKIP untuk tindak lanjut data dukung SAKIP 2024, yang diselenggarakan di BPMP Provinsi NTB bulan Juli 2024;
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024;
3. Pertemuan persiapan evaluasi AKIP Tahun 2024 yang diselenggarakan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen melalui zoom meeting pada bulan Agustus 2024;
4. Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi AKIP dan Penilaian Mandiri AKIP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek melalui zoom meeting pada bulan Agustus 2024;
5. Penyampaian dokumen data dukung SAKIP Tahun 2024 sebagai bahan untuk evaluasi AKIP BPMP Provinsi NTB Tahun 2024;
6. Evaluasi Mandiri AKIP BPMP Provinsi NTB Tahun 2024 pada bulan Agustus 2024.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu adanya gangguan layanan Pusat Data Nasional (PDN) 2 berdampak pada aplikasi SPASIKITA tidak dapat diakses. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan laporan capaian kinerja Triwulan II tidak dapat dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA dan dokumen SAKIP tidak muncul pada aplikasi esr.menpan.go.id

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 secara manual dan dokumen SAKIP disampaikan melalui tautan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/dukungsakip24>

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L di Triwulan III belum dapat diketahui karena masih fluktuatif. IKK ini didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Workshop penatausahaan keuangan dan RO Layanan Perkantoran. Untuk meningkatkan kinerja anggaran, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelaporan realisasi kinerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target pada aplikasi SAKTI;
2. Penyelesaian tagihan belanja (SPM) tepat waktu;
3. Pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan ketentuan;
4. Melakukan pengelolaan Uang Persediaan sesuai aspek ketepatan waktu dan persen GUP



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

(disebutkan);

5. Update Halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan dan realisasi Anggaran yang mengacu pada RPD Halaman III DIPA.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah terjadi retur GUP di akhir bulan sehingga tidak dapat melakukan pengajuan GUP yang selanjutnya. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis pada sistem bank tempat rekening bendahara BPMP Provinsi NTB berada.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengajukan retur span-Bank menggunakan format sesuai Per-9/PB/2018 mengenai pengaturan retur.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	4797	4797	0	Rp11.392.717.000	Rp8.410.402.761	Rp2.982.314.239
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5154	5154	0	Rp214.000.000	Rp212.603.900	Rp1.396.100
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp4.475.000	Rp5.525.000
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp486.585.000	Rp312.220.483	Rp174.364.517
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp16.456.354.000	Rp14.085.257.604	Rp2.371.096.396
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.948.600.000	Rp1.357.777.500	Rp590.822.500
Total Anggaran					Rp30.508.256.000	Rp24.382.737.248	Rp6.125.518.752

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Disusun jadwal pemantauan reguler mingguan untuk memastikan semua sasaran tercapai sesuai rencana;
2. Melaporkan kepada pimpinan hasil pemantauan reguler;
3. Menindaklanjuti hasil pemantauan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Mataram, 31 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Katman



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Laporan Kinerja Triwulan 4 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	3.92	2.01
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	72.70	%	72.70	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.77	Nilai	97.77	98.70

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress/Kegiatan

Capaian IKK Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya untuk triwulan IV masih menggunakan capaian tahun 2023 dikarenakan sumber data angka capaian untuk tahun 2024 belum didapatkan dan diperkirakan akan diperoleh pada bulan Januari 2025. IKK ini didukung oleh RO Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKK ini adalah Pelaksanaan Transisi PAUD-SD dalam bentuk:

- Supervisi pelaksanaan RTL Pokja Bunda PAUD di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Pokja Bunda PAUD Provinsi NTB yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024;
- Koordinasi Kemitraan berkala dengan mitra daerah se-Pulau Lombok yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024;
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Mitra tentang perubahan pembelajaran.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Informasi tentang Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan di satuan pendidikan belum tersampaikan secara merata;
2. Pemahaman satuan pendidikan dan mitra daerah terkait kebijakan penguatan pembelajaran 6 (enam) kemampuan pondasi masih rendah.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu:

1. Penyebaran informasi Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan melalui berbagai kanal agar tersampaikan ke satuan pendidikan;
2. Meningkatkan pemahaman mengenai 6 (enam) kemampuan pondasi di satuan pendidikan melalui pendampingan, mengefektifkan keberadaan Forkom Guru PAUD-SD dan meningkatkan peran Pokja Bunda PAUD di daerah. Serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Mitra Daerah.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress/Kegiatan

Capaian IKK Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) sebesar 100%. Perhitungan ini berdasarkan Indeks SPM Rapor Pendidikan Dikdasmen tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. RO yang mendukung IKK ini adalah Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IKK ini yaitu:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka, berupa kegiatan:
 - a. Melaksanakan advokasi peningkatan progres belajar di PMM bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Melaksanakan pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun 2023/2024 pada bulan Oktober 2024;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi peran Mitra Pembangunan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024.
2. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional, berupa kegiatan:
 - a. Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024 yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024 yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - c. Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024 jenjang SD pada bulan November 2024;
 - d. Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024 secara luring.
3. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah berupa kegiatan Penanganan/pendampingan/advokasi Anak Tidak Sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara pada bulan November 2024.
4. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak, berupa kegiatan:
 - a. Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP-UPT yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Penguatan Literasi dan Numerasi sekolah pelaksana PSP yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - c. Visitasi terkait pengimbasan PMM dan Non PMM UPT yang diselenggarakan pada bulan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- November 2024;
- d. Monev Pemanfaatan BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan pendampingan daerah dalam fasilitasi kombel pada bulan November 2024 dengan cara turun ke dinas pendidikan dan sekolah penggerak di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - e. Koordinasi percepatan transformasi satuan pendidikan pelaksana PSP dengan PMO pada bulan Desember 2024;
 - f. Refleksi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pada bulan Desember 2024.
5. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data, berupa kegiatan:
 - a. Pendampingan penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT pada bulan Oktober 2024;
 - b. Pelaksanaan refleksi implementasi PBD satpem oleh UPT pada bulan November 2024.
 6. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan, berupa kegiatan:
 - a. FGD tindak lanjut hasil pendampingan komunitas belajar yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Pelatihan monitoring untuk karyawan BPMP Provinsi NTB melalui kelompok belajar Senang Belajar setiap hari Senin di BPMP Provinsi NTB;
 - c. BPMP Award 2024 yang diselenggarakan pada bulan Desember 2024. Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Mitra BPMP Provinsi NTB yang berdedikasi;
 - d. Refleksi program BPMP yang diselenggarakan pada bulan Desember 2024 yang melibatkan seluruh karyawan BPMP Provinsi NTB.
 7. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah, berupa kegiatan:
 - a. Bimtek pemerintah daerah terkait integrasi Markas-SIPD modul yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Advokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk optimalisasi belajar.id yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 dengan turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - c. Rapat koordinasi indeks kualitas Dapodik dengan Disdik yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024 dengan mengundang penanggung jawab dan operator Dapodik dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. Uji petik peningkatan kualitas Dapodik pada bulan Oktober 2024 ke Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan sasaran yang nilai indeks kualitas Dapodiknya turun;
 - e. Sosialisasi dan advokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - f. Pendampingan satpen untuk optimalisasi akun belajar.id tahap 2 yang dilaksanakan pada bulan November 2024 dengan turun ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota;
 - g. Bimtek dan peningkatan kapasitas kombel belajar.id yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - h. Rapat Koordinasi Daerah champion tahap 2 (Bimtek kapasitas kombel) yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - i. Penyusunan laporan hasil analisis kualitas Dapodik pada bulan Desember 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang merupakan operator Dapodik Kabupaten/Kota dan internal BPMP Provinsi NTB.
 8. Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi, berupa kegiatan:
 - a. Refleksi performance media sosial dan laman UPT yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024;
 - b. Review konten program prioritas yang diselenggarakan pada bulan November 2024;
 - c. Media placement lokal dalam rangka kampanye program prioritas yang diselenggarakan pada bulan Desember 2024.
 9. Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran, berupa kegiatan Monitoring dan evaluasi program pemulihan dan transformasi pembelajaran di semua jenjang yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 10. Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat, berupa kegiatan refleksi dan evaluasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat di satuan pendidikan binaan yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2024.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Rendahnya pemanfaatan platform pembelajaran khususnya akun belajar siswa;
2. Dalam pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat, sekolah binaan belum berhasil menciptakan perubahan perilaku dalam mendukung Gerakan Sekolah Sehat;
3. Rendahnya nilai indeks kualitas Dapodik satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan indikator kelengkapan, validitas dan mutakhir yang mempengaruhi capaian indeks kualitas Dapodik Kabupaten/Kota.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Mendorong operator/admin pengelola akun Belajar Sekolah dan guru untuk membantu siswa dalam aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran, serta berbagi informasi dan pengalaman terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran kepada siswa;
2. Melaksanakan refleksi dan evaluasi ke sekolah binaan untuk memperoleh data implementasi yang selanjutnya dianalisis untuk dapat merumuskan strategi tindak lanjut;
3. Koordinasi dengan penanggung jawab dan operator Dapodik Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi dan melakukan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Dapodik satuan pendidikan di wilayah masing-masing.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat SAKIP A dengan nilai 87.6. IKK Predikat SAKIP didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan ZI - WBK/WBBM. Untuk mendukung capaian IKK ini, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BPMP Provinsi NTB Triwulan III dan IV tahun 2024. Laporan capaian kinerja triwulan III disusun pada bulan Oktober 2024, sedangkan laporan capaian kinerja triwulan IV disusun pada bulan Desember 2024;
2. Pelaporan komponen rincian output tahun 2024 melalui aplikasi e-Monev Bappenas;
3. Pelaksanaan Masa Sanggah Evaluasi AKIP tahun 2024. Masa Sanggah dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d 29 November 2024;
4. Mengikuti Sosialisasi pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2024 pada bulan Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek melalui media webinar;
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi BPMP Provinsi NTB tahun 2024;
6. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan Draf Laporan Kinerja BPMP Provinsi NTB tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2024 secara luring;
7. Mengikuti kegiatan capaian indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) Ditjen Paudnasmen tahun 2024 pada bulan Desember 2024 melalui media zoom meeting.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu menu Simproka pada aplikasi SPASIKITA yang digunakan untuk penginputan capaian sampai level komponen di *take down* , sehingga penginputan di tahun 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



Balai
Sertifikasi
Elektronik

langsung melalui aplikasi e-Monev Bappenas. Karena informasi dan asistensi penginputan melalui aplikasi e-Monev Bappenas baru diperoleh pada bulan November 2024, satuan kerja perlu kerja ekstra untuk menyelesaikan penginputan capaian dari bulan Januari s.d November 2024.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu dengan melakukan *cross check* hasil intergrasi penginputan dari Simproka ke aplikasi e-Monev Bappenas sehingga satuan kerja tinggal melanjutkan penginputan, tidak perlu mengulang dari awal bulan Januari 2024.

[SK 2] Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/L yang fix baru diperoleh pada bulan Januari 2025. Untuk pengukuran kinerja Triwulan IV tahun 2024, capaian BPMP Provinsi NTB per 28 Desember 2024 sebesar 98.70. IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/L didukung oleh RO Layanan Umum pada komponen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, workshop penatausahaan keuangan dan RO Layanan Perkantoran. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran yaitu:

1. Pencapaian target penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan ketentuan;
2. Pelaporan realisasi kinerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan target pada aplikasi SAKTI;
3. Penyelesaian tagihan belanja (SPM) tepat waktu;
4. Melakukan pengelolaan uang persediaan sesuai aspek ketepatan waktu dan persen GUP (disebutkan);
5. Update Halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan dan realisasi anggaran yang mengacu pada RPD halaman III DIPA;
6. Penyampaian data kontrak dan pengajuan SPM kontraktual sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendala/Permasalahan

Kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Adanya edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan pada 7 November 2024 tentang pemotongan perjalanan dinas. Surat ini berisi arahan dari Menteri Keuangan kepada pejabat negara untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk sisa anggaran tahun 2024. Hal ini mempengaruhi pola pembayaran belanja perjalanan dinas untuk kegiatan BPMP Provinsi NTB;
2. Nilai Deviasi Halaman III DIPA masih belum mencapai 100% dikarenakan seringnya perubahan jadwal kegiatan. Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Merubah pola pembayaran belanja perjalanan dinas untuk transport peserta kegiatan khususnya yang berasal dari pulau Sumbawa, yang semula menggunakan angkutan udara menjadi angkutan darat;
2. Melakukan penyesuaian atau revisi halaman III DIPA agar deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh dengan rencana awal.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**


C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	4797	4797	0	Rp11.392.717.000	Rp10.223.057.511	Rp1.169.659.489
[DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	5154	5154	0	Rp214.000.000	Rp213.979.900	Rp20.100
[WA.2005.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
[WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp486.585.000	Rp410.222.683	Rp76.362.317
[WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp16.456.354.000	Rp16.183.019.252	Rp273.334.748
[WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.948.600.000	Rp1.934.867.500	Rp13.732.500
Total Anggaran					Rp30.508.256.000	Rp28.975.146.846	Rp1.533.109.154

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Perlunya konsistensi dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, karena hal ini berpengaruh pada nilai IKPA BPMP Provinsi NTB di komponen deviasi halaman III DIPA;
2. Perlunya melakukan reviu terhadap indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa data dukung yang terkumpul sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
3. Perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan yang mengintervensi indikator yang sama untuk memastikan pencapaian target dilakukan dengan sumber daya yang efisien.

Mataram, 30 Desember 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Katman</p>
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**Pernyataan Telah Direviu
BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mataram, 24 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Partoyo, S.Pd

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Panji Tilarnegara No. 8, Mataram, 83114
Telepon (0370) 631088 Faksimile (0370) 629835
Laman <https://bpmptb.kemdikbud.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024
NOMOR : 149/C7.19/ Pr- /VI/11/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024;

b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Intansi Pemerintah;
7. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dalam lampiran I;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun laporan kinerja dalam bentuk dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dalam lampiran II;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 05 Agustus 2024
Kepala,



Katman, S.Pd., M.A
NIP.198104262006042003

Tembusan Yth.
Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi
Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Nomor : 149 /C7.19/ PP/VIII /2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

No.	Nama, NIP, Pangkat & Golongan	Jabatan
1.	Katman, S.Pd., M.A NIP.196804082001121001 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala BPMP Provinsi NTB
2.	Hj. Lielies Miningrum, SE NIP.197608132001122001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Umum
3.	Hj. Lilis Sulianita, S.Pd., M.M. NIP.197408242006042027 Pembina Utama Muda, IV/c	Widyaprada Ahli Madya
4.	H. Bakhtiar Ardiansyah, S.Pd, M.Pd. NIP.197808162003121004 Pembina Tk.I, IV/b	Widyaprada Ahli Madya
5.	Anggraini Naskawati, M.Pd. NIP.197305222003122001 Pembina Tk.I, IV/b	Widyaprada Ahli Madya
6.	Dedy Wahyuddin,S.T., M.T. NIP.197711032003121001 Pembina, IV/a	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik
7.	Fajri Elfiyani, ST., M.Eng. NIP.197601242005012001 Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
8.	Laely Adyani, S.Si., M.Pd. NIP.198003162006042001 Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Muhammad Idrus, M.Ag NIP.197503222005011001 Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
10.	Musmuliadi, S.Si., M.Pd. NIP.197901032005011002 Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
11.	Baiq Haimun, S.Pd., M.Pd. NIP.198006012006042001 Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Ahlun Mariani, S.Si. NIP.197605102006042002 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Baiq Titik Hestina, S.Pd NIP.197904192002122001 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan

No.	Nama, NIP, Pangkat & Golongan	Jabatan
14.	Ari Rahmanningrum, S.Pd NIP.198104262006042003 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
15.	Kadril Hayati, S.Sos NIP.197904232002122001 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
16.	Latifah Hikmawati, S.P. NIP.197307252002122001 Penata Tk.I, III/d	Pengolah Data dan Informasi
17.	Rapiki, S.Pd. NIP.197203222001121001 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik
18.	Dian Rohaidah, S.Sos.,M.I.P. NIP.198104012005012002 Penata Tk.I, III/d	Pengolah Data dan Informasi
19.	St. Agung Budiwidodo, A. Md NIP.197404022002121001 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi
20.	Kundiarto, S.Si NIP.197501132015041001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
21.	Husaini, M.Pd. NIP.198010272008101001 Penata Muda Tk.I, III/b	Pengolah Data dan Informasi
22.	Andan Januar Jaya, S.T. NIP.198501292019021004 Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi
23.	Billy Febiar, S.Kom. NIP.199309282019021002 Penata Muda Tk.I, III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama
24.	Ni Ketut Desi Sustari, SE. NIP.199412022019022010 Penata Muda, III/a	Pengolah Data dan Informasi
25.	Wahyu Ramdani, S.Kom.	PPNPN



Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Uraian tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Nomor : 149 /C7.19/PP/VIII/2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

Uraian tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 :

1. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja;

2. Ketua

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Tahun sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

3. Anggota

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dan bukti capaian kinerja , serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan pedoman yang berlaku.



Katman, S.Pd., M.A

NIP.198104262006042003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Panji Tilarnegara No. 8, Mataram, 83114
Telepon (0370) 631088 Faksimile (0370) 629835
Laman <https://bpmptnb.kemdikbud.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025
NOMOR : 071 /C7.19/ PP / S /2025**

TENTANG

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pada BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja tahun 2024;

b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Intansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja tahun 2024 BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dalam lampiran I;
- Kedua : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. membantu penyelenggaraan SAKIP di unit kerja; dan
 - b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala,



Katman, S.Pd., M.A

NIP.198104262006042003

Tembusan Yth.

Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Reviu Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

Nomor : 071 /C7.19/ PR /T /2025

Tanggal : 21 Januari 2025

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Katman, S.Pd., M.A NIP.196804082001121001	Kepala BPMP Provinsi NTB	Pengarah
2.	Hj. Lielies Miningrum, SE NIP.197608132001122001	Kepala Subbagian Umum	Penanggung Jawab
3.	Partoyo, S.Pd. NIP.197511102005011005	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4.	Ida Nur Hidayati, SE, M.M. NIP.198009272005012002	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris/Anggota
5.	Herlina Widiastuti, S.Si NIP.197704132006042001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Akhmad Sudirman, S.Si.,M.Ed. NIP.198008182008011007	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
7.	Nyoman Sri Lestari, A.Md.. NIP. 199605072020122028	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Kepala,



Katman, S.Pd., M.A

NIP.198104262006042003

BPMP NTB
MENUJU
WBBM **NO**
Gratifikasi



bmpntb



t.me/ult_bpmpntb



08113806669



<https://bpmpntb.kemdikbud.go.id>

Apakah anda menemukan hal berikut di BPMP Provinsi NTB?

- 1 Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang
- 2 Adanya indikasi Korupsi
- 3 Adanya indikasi pungutan liar



SEGERA LAPORKAN PENGADUAN ANDA MELALUI
bpmpntb.kemdikbud.go.id/s/lapor